

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

United Nations Development Programme (UNDP) merekomendasikan bahwa martabat manusia seharusnya menjadi tujuan hakiki pembangunan sebuah negara. Manusia yang bermartabat adalah manusia yang dapat menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif (Human Development Report 1990).

Karenanya, hingga kini ukuran yang dijadikan standar keberhasilan pembangunan manusia sebuah negara adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI). Konsep pembangunan manusia itu sendiri pada dasarnya memiliki makna yang sangat luas. Konsep ini mencakup semua dimensi dasar yang dimiliki oleh manusia. Namun, ide dasar dari konsep pembangunan manusia pada intinya cukup sederhana, yaitu menciptakan pertumbuhan positif dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan, serta perubahan dalam kesejahteraan manusia.

Oleh karena itu, manusia harus diposisikan sebagai kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Konsep pembangunan manusia diukur dengan menggunakan pendekatan tiga dimensi dasar manusia, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Dimensi umur panjang dan sehat diwakili oleh indikator harapan hidup saat lahir. Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Sementara itu, dimensi standar hidup layak diwakili oleh

pengeluaran per kapita. Ketiga dimensi ini terangkum dalam suatu indeks komposit yang membentuk IPM.

UNDP memperkenalkan IPM sejak tahun 1990. Dalam perjalanannya, UNDP telah beberapa kali melakukan revisi metode penghitungan IPM hingga tahun 2010 UNDP melakukan revisi yang cukup besar dengan menyebutnya sebagai era baru pembangunan manusia. Dalam metode baru ini dikenalkan indikator harapan lama sekolah yang menggantikan indikator melek huruf dan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita yang menggantikan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita.

Sejak tahun 2015, semua pembangunan pada tataran global mengacu pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau lebih dikenal sebagai *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Konsep SDGs ini berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 tentang isu *depletion* sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim yang semakin krusial, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. SDGs dibentuk oleh tiga pilar dengan 17 tujuan (goal) yang harus dicapai. Di antara 17 tujuan SDGs, terdapat beberapa target yang berhubungan dengan pembangunan manusia, yaitu tujuan ketiga, tujuan keempat, dan tujuan kedelapan. Tujuan ketiga adalah menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia. Tujuan keempat adalah menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua. Sedangkan tujuan kedelapan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,

kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Hal ini menunjukkan pembangunan manusia selalu menjadi isu penting dalam perancangan dan strategi pembangunan berkelanjutan.

Pada tingkat nasional, agenda pembangunan pemerintah Nawacita juga mengangkat pembangunan manusia sebagai isu penting yang harus menjadi prioritas. Butir kelima Nawacita menegaskan bahwa pemerintah akan memprioritaskan peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia. Hal itu dilakukan dengan melakukan dua program, yaitu peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program “Indonesia Pintar”; dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program “Indonesia Kerja” dan “Indonesia Sejahtera” dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah Kampung Deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.

1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan publikasi “*Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Temanggung 2018*” secara umum adalah untuk melihat perkembangan IPM Kabupaten Temanggung hingga tahun 2016. Sedangkan tujuan secara khusus adalah :

1. Melihat perkembangan IPM Kabupaten Temanggung dan masing-masing komponen IPM dengan metode baru selama tahun 2013 – 2017.
2. Mengetahui posisi relatif capaian IPM Kabupaten Temanggung terhadap capaian IPM Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota se eks Karesidenan Kedu.

3. Mengetahui bagaimana hubungan antara IPM, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017.

1.3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam analisis ini bersumber dari :

1. Data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang diselenggarakan oleh BPS setiap tahun.
2. Data publikasi BPS yang berasal dari hasil survei-survei lainnya

1.4. Sistematika Penulisan

Publikasi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I Menyajikan tentang pendahuluan yaitu meliputi latar belakang, tujuan sumber data, serta sistematika penulisan
- Bab II Menyajikan tentang metodologi meliputi konsep tentang pembangunan manusia dan perkembangan metode penghitungan IPM.
- Bab III Menyajikan analisis dan pembahasan yang meliputi perkembangan pembangunan di Kabupaten Temanggung dalam beberapa dimensi, perkembangan Indeks Pembangunan Kabupaten Temanggung serta hubungan antara IPM dan pertumbuhan ekonomi maupun kemiskinan.
- Bab IV Menyajikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis.

BAB II

METODOLOGI

2.1. Konsep Pembangunan Manusia

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya penambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu daerah dan pemerataan pendapatan bagi suatu penduduk suatu daerah. Cara paling mudah untuk mengartikan pembangunan ekonomi adalah dimana pertumbuhan ekonomi ditambah dengan perubahan. Artinya, ada tidaknya pembangunan ekonomi suatu daerah pada suatu tahun tertentu tidak saja diukur dari kenaikan produksi barang dan jasa yang berlaku dari tahun ke tahun, tetapi juga perlu diukur dari perubahan lain yang berlaku dari berbagai aspek kegiatan ekonomi seperti perkembangan pendidikan, perkembangan teknologi, peningkatan dalam kesehatan, peningkatan dalam infrastruktur yang tersedia dan peningkatan dalam pendapatan dan kemakmuran masyarakat (Sukirno, 2006).

Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan alat dari pembangunan. Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Amartya Sen, guru besar ekonomi dan filsafat dari Universitas Havard menegaskan bahwa pembangunan ekonomi seharusnya diterjemahkan sebagai suatu proses ekspansi dari kebebasan positif yang

dinikmati oleh masyarakat (Kuncoro, 2014). Pada tahun 1991 Bank Dunia menerbitkan laporannya yang menegaskan bahwa “tantangan utama pembangunan....adalah memperbaiki kualitas kehidupan. Pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional.

Paradigma pembangunan menempatkan manusia (penduduk) sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan, yaitu tercapainya penguasaan atas sumber daya (pendapatan untuk mencapai hidup layak), peningkatan derajat kesehatan (usia hidup panjang dan sehat) dan meningkatkan pendidikan (kemampuan baca tulis dan keterampilan untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat dan kegiatan ekonomi). Paradigma pembangunan manusia mengandung empat komponen utama:

1. Produktifitas

Manusia harus berkemampuan untuk meningkatkan produktifitasnya dan berpartisipasi penuh dalam proses mencari penghasilan dan lapangan kerja. Oleh karenanya, pertumbuhan ekonomi merupakan bagian dari model pembangunan manusia.

2. Pemerataan

Setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapuskan sehingga semua orang dapat berpartisipasi dan mendapatkan keuntungan dari peluang yang tersedia.

3. Keberlanjutan

Akses terhadap peluang/kesempatan harus tersedia bukan hanya untuk generasi sekarang tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Semua bentuk sumber daya fisik harus dapat diperbaharui.

4. Pemberdayaan

Pembangunan harus dilakukan oleh semua orang, bukannya semata-mata (dilakukan) untuk semua orang. Semua orang harus berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan dan proses yang mempengaruhi kehidupan mereka.

UNDP dalam *Human Development Report* yang pertama (1990) menyatakan bahwa sasaran-sasaran pokok pembangunan adalah untuk menciptakan suatu lingkungan yang memungkinkan rakyat menikmati kehidupan yang panjang, sehat dan kreatif. UNDP sangat menekankan arti pentingnya pembangunan yang berpusat pada manusia yang menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, dan bukan sebagai alat bagi pembangunan. Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk. Pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu, pengetahuan dan untuk mempunyai akses terhadap sumberdaya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. Semakin tinggi pendidikan semakin banyak peluang-peluang yang bisa diraih. Manusia bisa menentukan pilihannya dalam sistem pasar yang berfungsi dengan baik. Pembangunan

manusia jugamerupakanperwujudantujuanjangkapanjangdarisuatumasyarakat, danmeletakkanpembangunan di sekelilingmanusia, bukanmanusia di sekelilingpembangunan. Sebagai salah satu upaya untuk menganalisis status pembangunan baik antar negara maupun antar daerah, maka UNDP menyusun *Human Development Index*(HDI) atau Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang diterbitkan dalam publikasi berjudul *Human Development Reports*.

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunansuatu wilayah/negara. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Indeks ini dikenalkan oleh pemenang Nobel India, Amartya Sen dan seorang ekonom Pakistan Mahbub ul Haq pada 1990. Sejak itu indeks ini dipakai oleh program pembangunan PBB pada laporan IPM tahunannya.

Indikasi peningkatan atau penurunan kinerja pembangunan manusia setiap tahunnya dapat diamati dari perkembangan angka IPM dari tahun ke tahun. Keterbandingan angka IPM kabupaten dengan kabupaten/kota lain, angka IPM provinsi bahkan angka IPM nasional menentukan posisi relatif capaian IPM sekaligus mengukur relevansi pembangunan manusia di kabupaten itu dengan tingkat pemerintahan di atasnya.

2.2. Metodologi Penghitungan IPM

Sumber data :

- a. Angka harapan hidup saat lahir, bersumber dari Sensus Penduduk 2010-SP2010, Proyeksi Penduduk)
- b. Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)
- c. PNB per kapita tidak tersedia pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga di proksidengan pengeluaran per kapita disesuaikan menggunakan data SUSENAS.

Konsep dan Definisi

Angka Harapan Hidup Saat Lahir - AHH (*Life Expectancy –e⁰*)

Angka Harapan Hidup saat Lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan.

Rata-Rata Lama Sekolah - RLS (*Mean Years of Schooling - MYS*)

Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.

Angka Harapan Lama Sekolah - HLS (*Expected Years of Schooling - EYS*)

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Pengeluaran per Kapita Disesuaikan

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity-PPP*). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas nonmakanan.

Teknis Penghitungan

Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup (AHH) dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program *Micro Computer Program for Demographic Analysis* (MCPDA) atau *Mortpack*.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) atau *Expected Years of Schooling (EYS)*

$$\text{Formula HLS} = \text{EYS}_\alpha^t = \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

Keterangan :

$\text{HLS} = \text{EYS}_\alpha^t$ Harapan Lama Sekolah pada umur α di tahun t

E_i^t jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t

P_i^t Jumlah penduduk usia i pada tahun t

i Usia ($a, a+1, \dots, n$)

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) atau *Mean Years Schooling (MYS)*

Ijazah	Konversi tahun lama sekolah (tahun)
Tidak punya ijazah	0
Sekolah Dasar	6
SMP	9
SMA	12
D1/D2	14
D3	15
S1/D4	16
S2/S3	18

Cara menghitung rata – rata lama sekolah

- menyeleksi penduduk pada usia 25th ke atas
- mengelompokkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki.
- mengelompokkan ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki.
- mengkonversi tahun lama sekolah menurut ijazah terakhir.

- menghitung lamanya bersekolah sampai kelas terakhir.

Keterangan	Lama Sekolah
Tidak Pernah Sekolah	0
Masih sekolah di SD s.d. S1	Konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1
Masih sekolah S2 atau S3	Konversi ijazah terakhir + 1 Ket: Karena di Susenas kode kelas untuk yang sedang kuliah S2 = 6 dan kuliah S3 = 7 yang tidak menunjukkan kelas
Tidak bersekolah lagi tetapi tidak tamat di kelas terakhir	Konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1
Tidak sekolah lagi dan tamat pada jenjang	Konversi ijazah terakhir

Pengeluaran per kapita per bulan

- Menghitung rata-rata pengeluaran per kapita dari Susenas. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota.
- Menghitung dari rata-rata pengeluaran per kapita dalam harga konstan (riil). Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100

$$\bar{X}_t = \frac{\bar{X}_t}{IHK_{(t,2012)}} \times 100$$

Dimana :

\bar{X}_t = Rata-rata pengeluaran per kapita per tahun atas dasar harga konstan 2012

\bar{X}_t = Rata – rata pengeluaran per kapita per tahun pada tahun t

$IHK_{(t,2012)}$ = IHK tahun t dengan tahun dasar 2012

Menghitung *Purchasing Power Parity* (PPP)

- menghitung *value* (rupiah yang dikeluarkan) dan *quantity* (jumlah barang yang dikonsumsi) 96 komoditas PPP dari data Susenas MODUL Konsumsi, terdiri dari 66 komoditas makanan dan 30 komoditas non makanan.
- menghitung *quantity* komoditi perumahan dari data Susenas KOR.
- menghitung harga rata-rata setiap komoditas. Harga yang tidak dapat diperoleh dari Susenas modul konsumsi diproksi dengan harga dari IHK.
- menghitung relatif harga terhadap Jakarta Selatan.
- menghitung PPP:

$$PPP_{\text{JKT}} = \prod_{i=1}^m \left(\frac{p_{ij}}{p_{ik}} \right)^{1/m}$$

Dimana

p_{ij} = harga komoditas i di Jakarta Selatan

p_{ik} = harga komoditas i di kab/kota j

m = jumlah komoditas

c. Menghitung pengeluaran per kapita disesuaikan

Setiap komponen IPM distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Rumus yang digunakan sebagai berikut :

Dimensi Kesehatan

$$I_{\text{kesehatan}} = \frac{AHH - AHH_{\min}}{AHH_{\max} - AHH_{\min}}$$

Dimensi Pendidikan

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{max} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{max} - RLS_{min}}$$

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

Dimensi Pengeluaran

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{max}) - \ln(pengeluaran_{min})}$$

IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran yaitu ;

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$$

Dalam menghitung IPM, diperlukan nilai minimum dan maksimum untuk masing-masing indikator. Berikut tabel yang menyajikan nilai-nilai tersebut.

Indikator	Satuan	Minimum		Maksimum	
		UNDP	BPS	UNDP	BPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Angka Harapan Hidup Saat Lahir	Tahun	20	20	85	85
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	0	0	18	18
Rata-rata lama sekolah	Tahun	0	0	15	15
Pengeluaran per kapita disesuaikan		100 (PPP US)	1007436* (Rp)	107721 (PPP US)	26572352** (Rp)

Keterangan:

- * Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara-Papua
- ** Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025

BAB III

ANALISIS SITUASI PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN TEMANGGUNG

3.1. Pembangunan Manusia di Kabupaten Temanggung

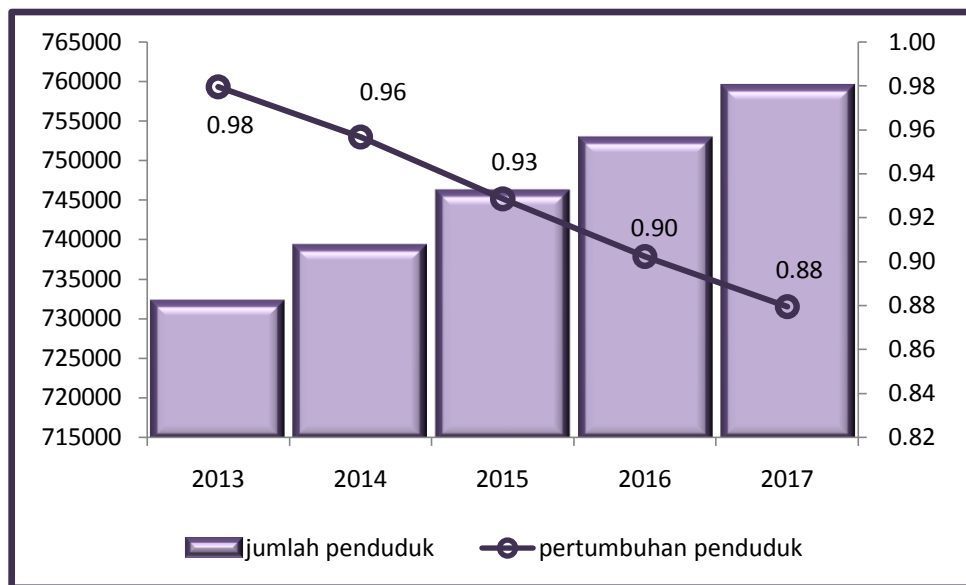
3.1.1. Kependudukan

Pembangunan ekonomi nasional bertumpu pada sumber daya manusia baik sebagai subjek sekaligus objek pembangunan ekonomi. Oleh karena penduduk terutama angkatan kerja harus mampu menjadi *agent of development* (agen pembangunan). Mutu dan kualitas penduduk sangat menentukan peran penduduk dalam persaingan ekonomi nasional dan global.

Sebagai *agent of development*, penduduk yang berkualitas merupakan komponen sentral dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Penduduk yang berkualitas memungkinkan untuk mengolah dan mengelola sumber daya alam dengan baik, tepat, efisien dan optimal dengan tetap menjaga kepentingan generasi yang akan datang. Penduduk yang berkualitas akan menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk dengan kapasitas daya dukung alam dan lingkungan. Sebaliknya penduduk yang besar dengan kualitas yang rendah justru akan menjadi beban bagi pembangunan itu sendiri.

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Temanggung sepanjang 2013 – 2017 sudah dibawah 1 persen dan konsisten mengalami penurunan yaitu dari 0,98 persen pada tahun 2013 menjadi hanya 0,88 persen pada Tahun 2017. Turunnya laju pertumbuhan penduduk ini secara alamiah disebabkan karena menurunnya fertilitas di Kabupaten Temanggung.

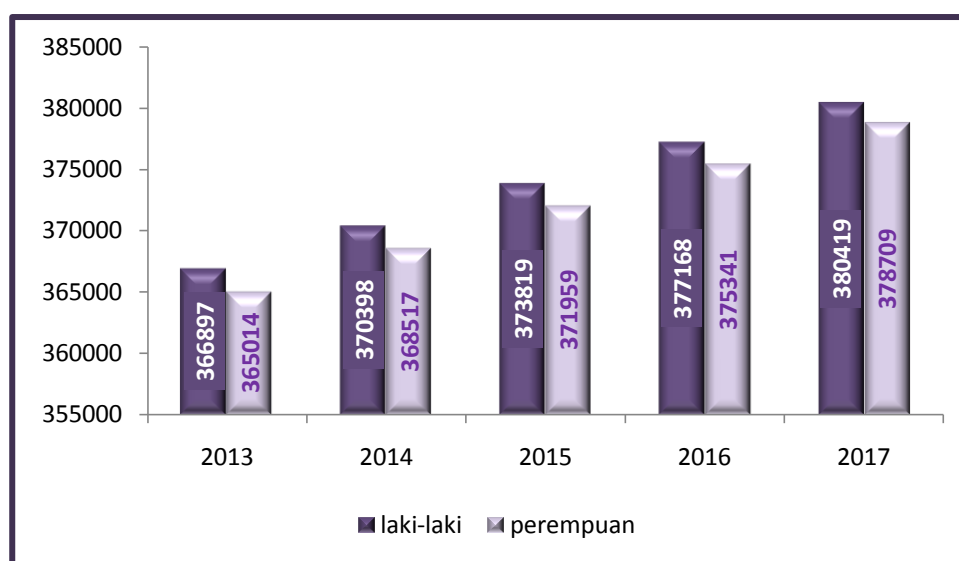
Gambar 3.1. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Temanggung, 2013 – 2017



Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

Karakteristik penduduk Kabupaten Temanggung menurut jenis kelamin ditandai dengan angka *sex ratio* yang berada diatas 100 sepanjang tahun 2013 – 2017. Pada tahun 2017 *sex ratio* mencapai 100,45. Artinya penduduk laki-laki masih lebih banyak dibanding penduduk perempuan meskipun hampir seimbang. Karakteristik ini berbeda dengan karakteristik penduduk Provinsi Jawa Tengah pada umumnya dimana lebih banyak penduduk perempuan dibanding penduduk laki-laki dengan *sex ratio* pada tahun 2017 mencapai 98,37.

Gambar 3.2. Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Temanggung, 2013 – 2017



Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

Dalam perdebatan antar ahli ekonom-demografer, aliran revisionis berpendapat bahwa penduduk mempunyai kaitan dengan pembangunan ekonomi dan penurunan kemiskinan (*population does matter*). Namun kunci keberhasilan *Population Does Matter* adalah adanya perubahan struktur umur penduduk penduduk (Adoetomo, 2007 : 21). Perubahan struktur umur penduduk ini terjadi karena adanya proses transisi demografi secara berkelanjutan dan jangka panjang hingga terjadinya pergeseran distribusi penduduk menurut umur dan menyebabkan menurunnya rasio ketergantungan penduduk usia non produktif dengan penduduk usia produktif. Ketika rasio ketergantungan berada pada titik terendah, biasanya terletak dibawah 50, maka terbukalah kesempatan yaitu *the window of opportunity* yang dikaitkan dengan bonus demografi. *Window of opportunity* menyediakan kondisi ideal untuk meningkatkan produktifitas, melalui 3 faktor yaitu :

a. Penawaran tenaga kerja

Jika penduduk usia kerja terserap dalam pasar kerja, maka produktifitas per kapita akan meningkat

b. Peranan perempuan

Perempuan cenderung mempunyai anak lebih sedikit dan masuk ke pasar kerja sehingga berperan dalam peningkatan produksi per kapita.

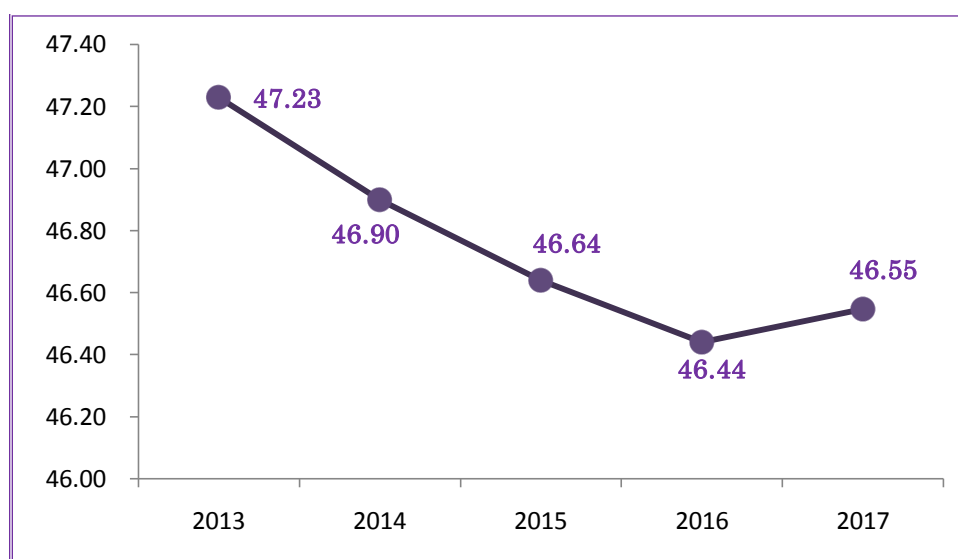
c. Tabungan

Semakin banyak penduduk dalam pasar kerja, maka semakin banyak pula tingkat tabungan dan investasi. Investasi yang produktif akan memicu penyerapan tenaga kerja, menaikkan pendapatan per kapita dan memenuhi kebutuhan dasar yaitu kesehatan dan pendidikan.

d. Modal Manusia

Jumlah penduduk dan pertumbuhannya merupakan faktor yang penting dalam menentukan proses perjalanan dan kecepatan pertumbuhan ekonomi

Gambar 3.3. Rasio Ketergantungan Kabupaten Temanggung, 2013– 2017



Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

Pergeseran distribusi umur penduduk dan penurunan rasio ketergantungan membentuk keadaan ideal yang berpotensi terjadinya bonus demografi. Kesempatan ini harus dipahami oleh pengambil kebijakan sampai tingkat daerah agar dapat memanfaatkan bonus demografi untuk kesejahteraan rakyat. Harus disadari juga bahwa pada masa yang akan datang, angka ketergantungan akan kembali meningkat yang disebabkan karena fertilitas rendah dan angka harapan hidup yang tinggi.

Rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Temanggung sepanjang 2013 – 2017 konsisten mengalami penurunan yaitu sebanyak 47,23 persen pada 2013 menjadi 46,44 persen pada 2016. Peningkatan angka ketergantungan menjadi 46,55 persen pada tahun 2017 tentu menarik perhatian tersendiri apakah angka ketergantungan sudah mencapai titik terendah dan akan kembali meningkat pada tahun selanjutnya. Peningkatan angka ketergantungan ini setidaknya menjadi bahan evaluasi awal apakah bonus demografi di Kabupaten Temanggung benar-benar sudah dimanfaatkan atau sebaliknya akan berlalu begitu saja.

3.1.2. Kesehatan

Kesehatan merupakan suatu kebutuhan utama dan investasi berharga dalam pembangunan. Kesehatan adalah hak asasi manusia yang menjadi salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dari fasilitas pelayanan kesehatan guna mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Mewujudkan derajat kesehatan merupakan upaya untuk meningkatkan keadaan kesehatan yang lebih baik dari sebelumnya.

Tingkat kesehatan penduduk dapat terlihat dari banyaknya penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan menderita sakit. Penduduk dikatakan menderita sakit jika mengalami keluhan kesehatan hingga terganggu aktifitasnya dan ditunjukkan dengan Angka Kesakitan. Angka kesakitan didefinisikan sebagai persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktifitas sehari-hari yang terjadi baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya selama satu bulan sebelum pencacahan. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan dan memiliki angka kesakitan yang tinggi berarti semakin rendah derajat kesehatan di wilayah tersebut.

Tabel 3.1. Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan dalam Satu Bulan Terakhir dan Angka Kesakitan Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Temanggung, 2017

Jenis Kelamin	Mengalami Keluhan Kesehatan	Angka Kesakitan
(1)	(4)	(5)
laki-laki	28,68	10,41
perempuan	29,58	12,55
laki-laki+perempuan	29,70	9,87

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

Hasil Susenas 2017 menunjukkan bahwa persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dalam satu bulan terakhir sebesar 29,70 persen. Penduduk laki-laki yang mempunyai keluhan kesehatan dalam satu bulan terakhir hanya sebesar 28,68 persen lebih rendah jika dibandingkan penduduk perempuan yang mempunyai keluhan kesehatan dalam satu bulan terakhir sebesar 29,58 persen. Penduduk yang mengalami keluhan kesehatan

dan terganggu aktivitasnya atau lebih dikenal angka kesakitan sebesar 9,87 persen. Angka kesakitan perempuan lebih tinggi (12,55 persen) dibandingkan angka kesakitan untuk laki-laki (10,41 persen).

Keinginan semua orang untuk hidup sehat merupakan hal utama yang tidak mengenal usia, baik orang tua maupun oleh anak-anak. Berbagai cara dan upaya dilakukan sehingga orang agar tetap dalam kondisi sehat, seperti melakukan olah raga maupun memeriksakan kesehatan pada petugas kesehatan. Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan bagi masyarakat diharapkan akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di sekitarnya. Dengan adanya fasilitas kesehatan yang lengkap dan memadai, maka masyarakat akan dengan mudah dan cepat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Di tahun 2017, sebanyak 43.35 persen penduduk yang mengalami kesehatan memilih untuk berobat jalan ke fasilitas kesehatan dalam satu bulan terakhir.

Tabel 3.2. Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Temanggung, 2014 – 2017

Jenis Kelamin	2014	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)
laki-laki	41.60	40,50	43.43
perempuan	43,98	50,14	43.26
laki-laki+perempuan	42,73	45,42	43.35

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

Jika dilihat berdasarkan alasan masyarakat yang mengalami keluhan kesehatan dan tidak berobat jalan dalam sebulan terakhir, persentase paling besar adalah mengobati sendiri sebesar 55,36 persen. Semakin banyaknya obat yang dijual secara bebas dan mudah untuk diperoleh, menyebabkan

masyarakat memilih untuk mengobati sendiri terlebih dahulu sebelum berkunjung ke fasilitas kesehatan. Sementara itu, masyarakat yang merasa tidak perlu berobat jalan juga memiliki persentase yang besar yaitu 36,94 persen. Alasan lainnya masyarakat memilih untuk tidak berobat jalan adalah tidak punya biaya berobat (1,50 persen), tidak ada biaya transportasi (1,39 persen) sedangkan 4,06 persen karena alasan lainnya.

Tabel 3.3. Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan Tidak Berobat Jalan dalam Satu Bulan Terakhir Menurut Alasan Tidak Berobat Jalan di Kabupaten Temanggung, 2017

Alasan Tidak Berobat Jalan	2017
(1)	(3)
Tidak mempunyai biaya berobat	1.50
Tidak ada biaya transportasi	1.39
Mengobati sendiri	55,36
Merasa tidak perlu	36,94
Lainnya	4.81
Jumlah	100.00

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Hambatan utama pelayanan kesehatan masyarakat miskin adalah masalah pembiayaan kesehatan. Untuk menjamin kemudahan akses terhadap pelayanan kesehatan, pemerintah telah berupaya menyediakan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin dan tidak mampu.

Jaminan kesehatan yang paling banyak dimiliki masyarakat adalah BPJS Kesehatan (42,83 persen). Jaminan kesehatan lainnya adalah Jamkesda (1,40 persen), Perusahaan/kantor (1,78 persen), dan Asuransi Swasta (0,58 persen).

Sebaliknya, masih ada sekitar 53,79 persen masyarakat yang tidak memiliki jaminan kesehatan.

Tabel 3.4. Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan di Kabupaten Temanggung, 2017

Jaminan Kesehatan	Persentase
(1)	(3)
BPJS Kesehatan *)	42.83
Jamkesda	1.40
Asuransi Swasta	0.58
Perusahaan/Kantor	1.78
Tidak ada jaminan kesehatan	53.79

Rokok merupakan produk yang mengandung bahan kimia yang cukup berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia. Kebiasaan merokok ini sudah menjadi hal umum di masyarakat. Tanpa disadari zat yang dikandung dalam rokok yang selalu dihisap dapat membuat rasa ketagihan dan candu yang sangat sulit untuk berhenti. Meskipun bahaya merokok sudah diketahui sejak lama oleh masyarakat, akan tetapi merokok dianggap lumrah dan menjadi suatu kebutuhan pokok yang harus terpenuhi di setiap harinya bagi perokok.

Sebagai daerah penghasil tembakau, perilaku merokok menjadi perilaku yang sudah menembus batas usia maupun gender. Banyak anak yang belum cukup umur sudah membiasakan diri untuk mengonsumsi rokok. Hal ini diakibatkan lingkungan sekitar mereka yang menjadi perokok aktif sehingga menimbulkan rasa ingin mencoba untuk merokok.

Terlepas dari itu, rokok juga sangat berbahaya bagi kesehatan para perokok pasif. Perokok pasif adalah seseorang yang tidak merokok secara langsung namun menghirup asap rokok dari orang-orang yang merokok di

sekitarnya seperti di rumah maupun di lingkungan kerja. Asap rokok yang dihirup oleh perokok pasif yang memiliki berbagai senyawa kimia yang berbahaya, maka perokok pasif tentu saja berpotensi mendapatkan risiko gangguan kesehatan. Meski tidak secara langsung merokok, perokok pasif bisa terkena dampak buruknya juga.

Tabel 3.5. Persentase Penduduk yang Merokok Tembakau dalam Sebulan Terakhir di Kabupaten Temanggung, 2017

Kebiasaan Merokok	Persentase
(1)	(3)
Ya, setiap hari	27,11
Ya, tidak setiap hari	2,27
Tidak	70,58
Tidak tahu	0,04
Total	100,00

Tabel diatas menunjukkan persentase penduduk yang memiliki kebiasaan merokok, baik setiap hari maupun tidak setiap hari, masing-masing sebesar 27,11 persen dan 2,27 persen. Sementara itu, penduduk yang tidak merokok sebesar 70,58 persen. Hal ini menunjukkan masih banyak penduduk yang memiliki kesadaran untuk tidak merokok meskipun berada di negeri tembakau.

3.1.3. Pendidikan

Pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Melalui pendidikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan. Selain memberi kontribusi secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi, pendidikan juga menetaskan sumber daya manusia yang berkualitas,

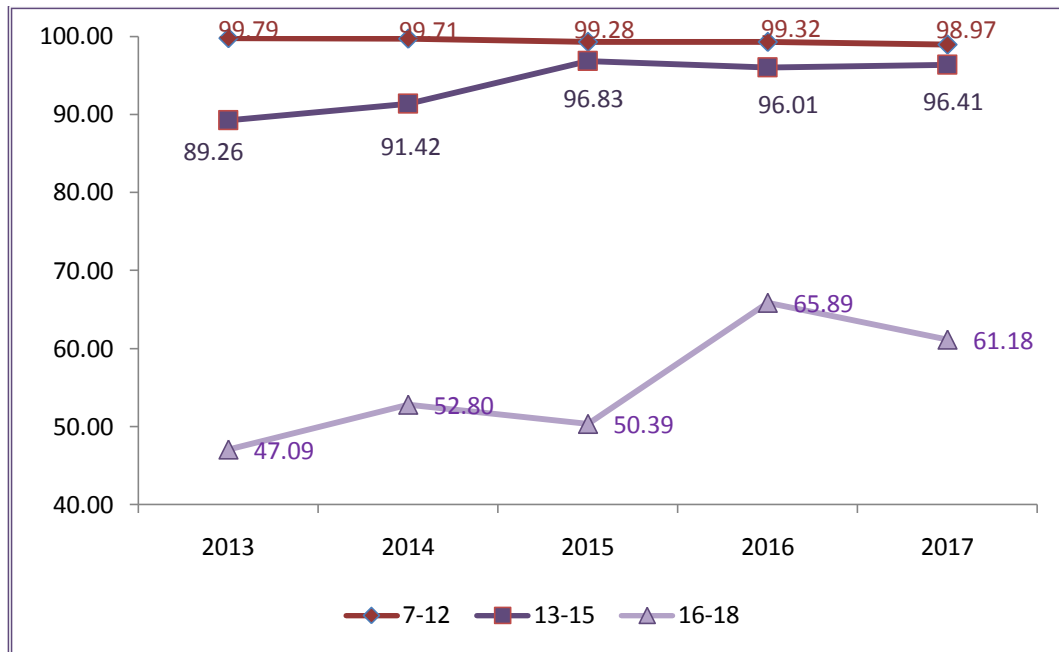
memiliki pengetahuan dan keterampilan serta menguasai teknologi, serta dapat menumbuhkan iklim bisnis yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Kegagalan dalam membangun pendidikan akan melahirkan berbagai problem krusial, seperti pengangguran, kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, serta permasalahan sosial politik.

Permasalahan pendidikan yang masih dihadapi oleh bangsa Indonesia sampai saat ini antara lain adalah kurangnya pemerataan pendidikan, kurangnya kualitas pendidikan, kurangnya relevansi pendidikan, dan kurangnya efisiensi dan efektivitas manajemen pendidikan.

Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah biasa dikenal beberapa indikator untuk mengetahuinya, antara lain: Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), serta Angka Partisipasi Murni (APM).

APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Indikator ini juga dapat digunakan untuk melihat struktur kegiatan penduduk yang berkaitan dengan sekolah. APS yang tinggi menunjukkan tingginya partisipasi sekolah dari penduduk usia tertentu. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

Gambar 3.4. Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Temanggung, 2013-2017



Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

Usia 7-12 tahun merupakan usia penduduk menempuh pendidikan dasar 6 tahun pertama. Namun hingga tahun 2017, angka partisipasi sekolah untuk penduduk 7 – 12 tahun cenderung stabil menuju angka 100 persen. Penurunan APS penduduk 7 – 12 tahun pada tahun 2017 sesungguhnya tidak menunjukkan penurunan partisipasi sekolah namun lebih disebabkan usia yang belum genap memasuki 7 tahun pada tahun ajaran 2016/2017

Gambar diatas juga menunjukkan bahwa meskipun masih rendah, APS untuk usia 13 -15 tahun dan usia 16 – 18 tahun meskipun masih rendah namun mengalami kecenderungan meningkat. Meskipun pada tingkat SLTP biaya langsung untuk besekolah, seperti seragam, SPP maupun buku sudah dibayarkan pemerintah melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS), namun sebagian

penelitian menunjukkan bahwa biaya tidak langsung untuk sekolah yang merupakan *opportunity cost* menjadi pertimbangan orang tua untuk menyekolahkan anaknya pada jenjang SLTP apalagi jenjang yang lebih tinggi. *Opportunity cost* tersebut adalah biaya tidak langsung ini bisa dalam bentuk hilangnya waktu anak untuk membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rutin rumah tangga sehari-hari (khususnya bagi anak perempuan), membantu mengasuh adiknya, atau bekerja di sektor informal. Bilamana biaya tidak langsung ini nilainya dianggap melebihi manfaat yang bisa diperoleh dari sekolah, maka hal ini membuat orang tua sulit dalam mengambil keputusan untuk investasi uangnya di bidang pendidikan anaknya. (Hartono, 2008).

Angka Partisipasi Kasar (APK), menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Nilai APK bisa lebih dari 100%. Hal ini disebabkan karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Sebagai contoh, banyak anak-anak usia diatas 12 tahun, tetapi masih sekolah di tingkat SD atau juga banyak anak-anak yang belum berusia 7 tahun tetapi telah masuk SD.

Adanya siswa dengan usia lebih tua dibanding usia standar di jenjang pendidikan tertentu menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya, siswa yang lebih muda dibanding usia standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah di usia yang lebih muda.

Tabel 3.6. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Temanggung, 2013– 2017

Jenjang Pendidikan	APK					APM				
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
SD	112.6	110.8	107.4	110.2	110.62	96.6	97.1	96.5	99.3	97.31
SLTP	81	80.3	94.7	85	85.63	68.4	72.7	76.1	77.6	77.1
SLTA	48.6	64	68.4	75.6	70.09	38.1	49.7	41.6	55.2	54.9

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah. Keterbatasan APM

adalah kemungkinan adanya *under estimate* karena adanya siswa diluar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu.

APK untuk jenjang SD sepanjang 2013-2017 selalu berada diatas 100 persen. Ini menunjukkan banyak anak diluar usia 7-12 yang sekolah di SD. Anak usia 7-12 tahun yang sedang sekolah di SD terlihat dari angka APM, yaitu sebesar 97,31 persen. Selisih antara APK dan APM terlihat semakin besar pada jenjang yang lebih tinggi, yaitu SLTP dan SLTA. Hal ini merupakan indikasi bahwa pada jenjang SLTP dan SLTA, kasus tinggal kelas semakin meningkat.

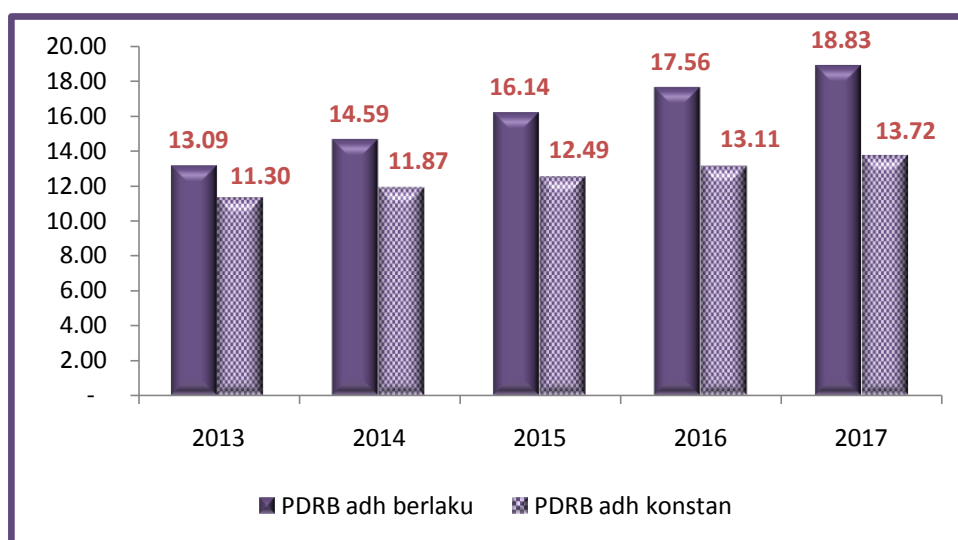
3.1.4. Ekonomi

Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah tingkat pertumbuhan ekonominya. Dengan asumsi bahwa dengan pertumbuhan yang tinggi akan menyerap tenaga kerja yang tinggi pula, yang pada hakekatnya meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Sehingga pertumbuhan yang tinggi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran penduduk.

Pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pembangunan manusia melalui dua jalur yaitu kegiatan rumah tangga dan kebijakan pemerintah. Pemanfaatan pendapatan rumah tangga untuk konsumsi makanan yang sehat, obat-obatan, buku pelajaran dan lain-lain akan meningkatkan kemampuan anggota rumah tangga. Sumber daya manusia yang berkualitas akan meningkatkan produktifitas ekonomi. Sedangkan kebijakan pemerintah untuk mendorong lapangan kerja akan meningkatkan permintaan pasar terhadap sumber daya manusia yang berkualitas. Pemerintah juga dapat mendorong pembangunan manusia melalui pengeluaran pemerintah. Semakin kaya suatu negara maka semakin besar pula dana yang tersedia bagi pemerintah untuk pembangunan manusia. Dengan kata lain,

pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan dua arah yang saling timbak balik. Untuk mengukur tingkat perkembangan ekonomi suatu daerah yang merupakan pencerminan tingkat kesejahteraan masyarakat diperlukan suatu indikator pengukuran yakni Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

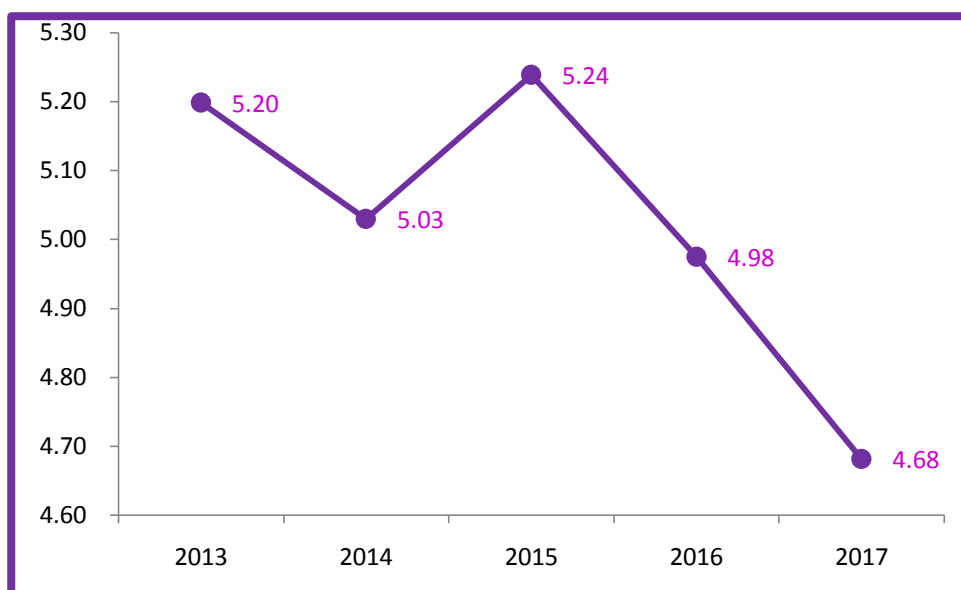
Gambar 3.5. Perkembangan Nilai PDRB ADH Berlaku dan ADH Konstan di Kabupaten Temanggung, 2012 – 2016 (triliun rupiah)



Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

Sepanjang tahun 2013 – 2016, besaran PDRB Kabupaten Temanggung, baik atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan. Pada tahun 2013, nilai PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 13,09 triliun rupiah dan pada tahun 2017 mencapai 18,83 triliun rupiah. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2013 adalah sebesar 11,30 triliun rupiah dan pada tahun telah mencapai 13,72 triliun rupiah.

Gambar 3.6. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung, 2013 – 2017



Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

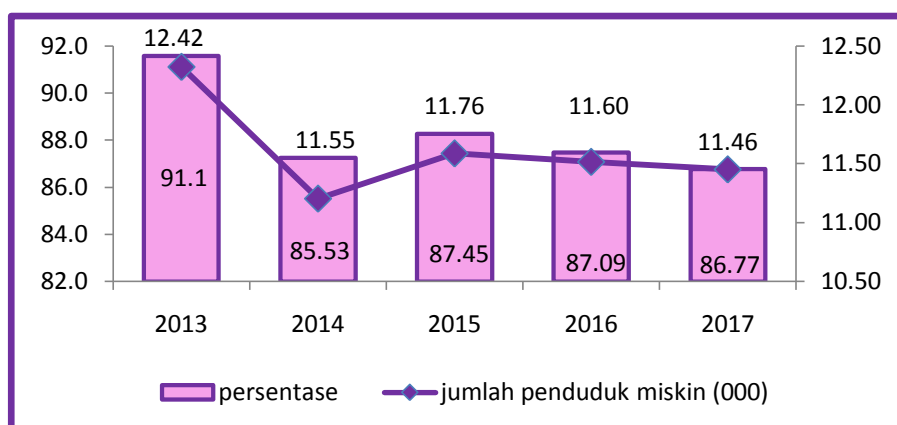
Pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi ini merupakan perbandingan pencapaian kinerja ekonomi suatu daerah pada periode waktu tertentu terhadap periode sebelumnya. Sepanjang tahun 2013 hingga 2017, kinerja perekonomian Kabupaten Temanggung selalu tumbuh positif diatas 4 persen bahkan mendekati 5 persen. Pertumbuhan paling tinggi dicapai pada tahun 2015 yaitu mencapai 5,24 persen, kemudian terus melambat hingga menjadi 4,68 persen pada tahun 2017.

3.1.5. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan tantangan terbesar dalam pembangunan karena kemiskinan memiliki dampak yang menyebar terhadap aspek aspek yang ada di masyarakat secara menyeluruh. Keberhasilan pembangunan manusia dapat dinilai secara parsial dengan melihat permasalahan mendasar dalam masyarakat dapat teratasi, diantaranya pengentasan kemiskinan. Idealnya pembangunan mampu

meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan berkurangnya kemiskinan sebagai dampak peningkatan pendapatan per kapita.

Gambar 3.7. Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Temanggung, 2013 – 2017

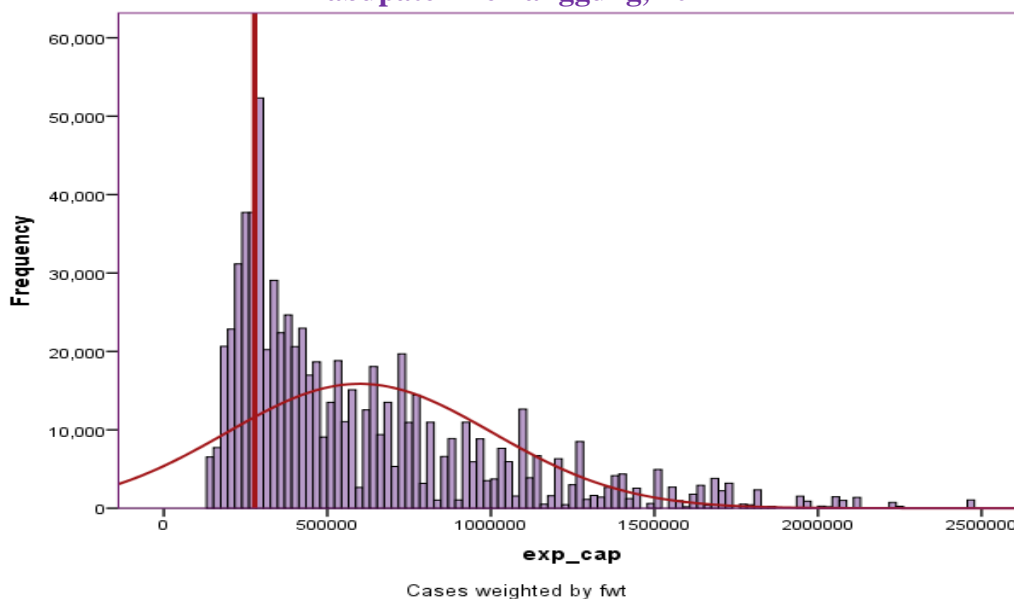


Sumber : Susenas (BPS Kabupaten Temanggung)

Tingkat kemiskinan mencakup besaran jumlah dan persentase penduduk miskin. Pada periode 5 tahun tersebut, perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Temanggung relatif berfluktuasi dari tahun ke tahun. Kemiskinan pada tahun 2013 adalah kemiskinan tertinggi sepanjang 5 tahun terakhir yaitu sebesar 12,42 persen. Pada tahun berikutnya, meskipun masih berfluktuasi, namun cenderung menurun menjadi 11,46 persen pada tahun 2017.

Meskipun data kemiskinan makro tidak dapat menunjukkan siapa dan dimana si miskin tersebut, namun fluktuasi kemiskinan ini menunjukkan bahwa banyak penduduk Kabupaten Temanggung yang merupakan kelompok rentan miskin, yaitu kelompok yang berada sedikit di atas garis kemiskinan. Penduduk pada kelompok ini sangat rentan terperosok dalam kemiskinan ketika garis kemiskinan meningkat sedikit saja.

Gambar 3.8. Distribusi Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Penduduk Kabupaten Temanggung, 2017



— = garis kemiskinan

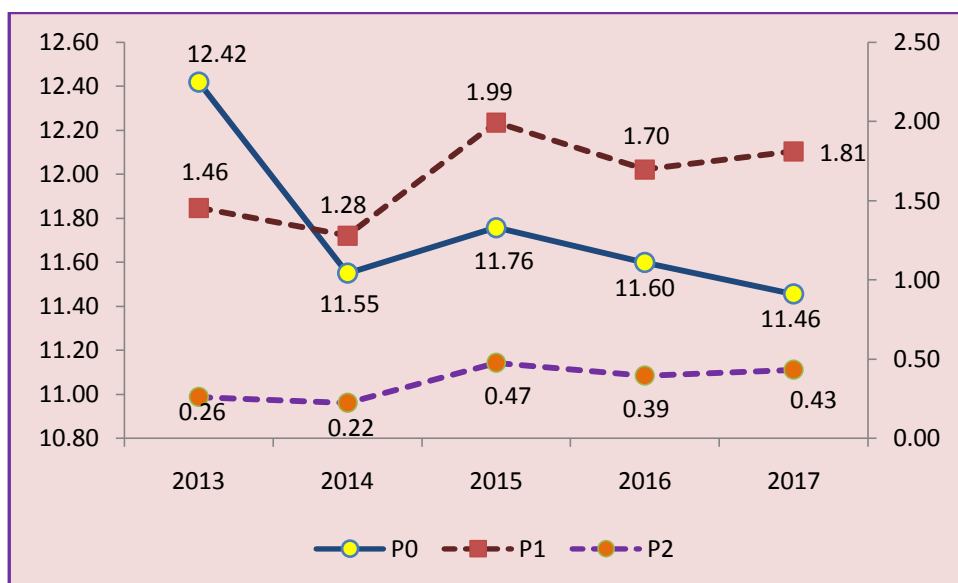
Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

Distribusi pengeluaran per kapita per bulan penduduk Kabupaten Temanggung sebagaimana gambar diatas menunjukkan bahwa selain penduduk yang tergolong miskin – disebelah kiri garis kemiskinan - kelompok penduduk yang tidak miskin namun hanya sedikit disebelah kanan garis kemiskinan masih cukup besar. Kelompok penduduk inilah yang dinamakan kelompok rentan miskin. Guncangan ekonomi yang relatif kecil sekalipun dapat menjadikan mereka kembali menjadi miskin.

Kebijakan pembangunan tentu mengurangi jumlah dan persentase pendudukan miskin saja, namun juga mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Tingkat kedalaman kemiskinan (*poverty gap index* atau P1) menjelaskan rata rata jarak antara taraf hidup dari penduduk miskin dengan

garis kemiskinan, yang dinyatakan sebagai suatu rasio dari kemiskinan. Penurunan pada P1 mengidentifikasi adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan. Hal ini juga berarti bahwa rata-rata pengeluaran dari penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan, yang mengidentifikasi berkurangnya kedalaman insiden kemiskinan. Sedangkan tingkat keparahan kemiskinan (*poverty severity indeks* atau P2) menunjukkan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Gambar 3.9. Perkembangan P0, P1 dan P2 di Kabupaten Temanggung, 2013 – 2017



Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

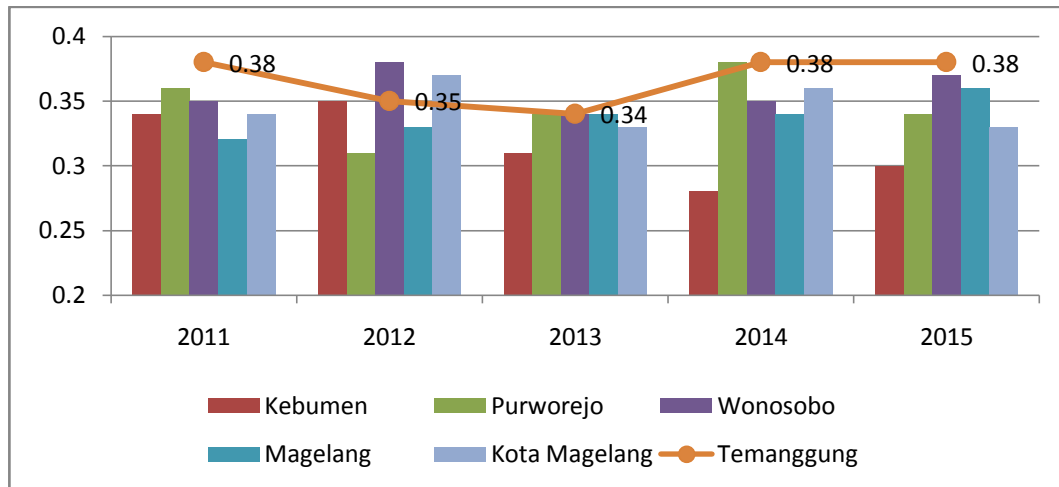
Dari gambar 3.10 diatas dapat dilihat bahwa meskipun sepanjang 3 tahun terakhir persentase penduduk miskin menurun, namun nilai P1 dan P2 terlihat meningkat pada tahun 2017. P1 yang meningkat pada tahun 2017 menunjukkan

bahwa rata rata pengeluaran penduduk miskin menurun semakin jauh dari garis kemiskinan. Hal ini mengindikasikan biaya yang dibutuhkan untuk mengangkat orang keluar dari kemiskinan semakin besar. Indeks P2 juga meningkat pada tahun 2017 yang mengindikasikan ketimpangan di antara penduduk miskin semakin melebar, sehingga ketepatan sasaran program-program dalam menjangkau terutama penduduk miskin semakin diperlukan.

Adanya ketimpangan yang besar antara si kaya dan si miskin dapat mengindikasikan bahwa pembangunan di daerah tersebut masih belum berhasil karena hanya dinikmati oleh sebagian orang saja, terutama orang kaya. Sedangkan orang yang miskin akan semakin menderita karena adanya ketimpangan tersebut.

Gini Ratio merupakan suatu ukuran yang biasanya digunakan untuk mengetahui ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat, walaupun masih ada ukuran-ukuran untuk mengetahui ketimpangan lainnya, akan tetapi Gini Ratio yang biasanya digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat.

Gambar 3.10. Perbandingan Gini Rasio Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Kedu, 2011 – 2015



Berdasarkan gambar diatas dapat kita lihat bahwa perkembangan gini ratio di Kabupaten Temanggung relatif cukup tinggi dibandingkan dengan daerah se eks Karesidenan Kedu. Angka gini ratio yang lebih dari 0,5 mengindikasikan bahwa di wilayah tersebut ketimpangan distribusi pendapatannya tergolong tinggi, sebaliknya jika angka gini ratio kurang dari 0,4 maka dapat mengindikasikan bahwa di wilayah tersebut ketimpangan pendapatannya tergolong rendah. Angka gini ratio dari tahun 2011 - 2015 di Kabupaten Temanggung konsisten dibawah 0.4, mengandung arti bahwa ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat di Kabupaten Temanggung tergolong rendah. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa angka gini rasio pada tahun 2014 dan 2015 mengalami peningkatan yang menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat mengalami peningkatan.

3.2. Perkembangan IPM Kabupaten Temanggung

Secara geografis, Kabupaten Temanggung terletak tepat di tengah-tengah Provinsi Jawa Tengah sehingga menjadi jalur strategis untuk melintasi antar kabupaten. Kabupaten Temanggung memiliki potensi sumber daya alam yang sangat tinggi. Dengan posisi yang strategis dan kekayaan alam tersebut, Temanggung memiliki potensi yang besar untuk menjadi kabupaten yang maju sesuai visi panjang Kabupaten Temanggung. Permasalahan terbesar terletak pada kesiapan sumber daya manusia yang dimiliki Kabupaten Temanggung dalam menjawab tantangan tersebut. Bila pertumbuhan serta perkembangan kualitasnya lambat atau cenderung di bawah kabupaten lain, niscaya kita akan tersisih dan pada akhirnya penduduk Temanggung hanya akan menjadi penonton roda pembangunan yang berputar disekelilingnya.

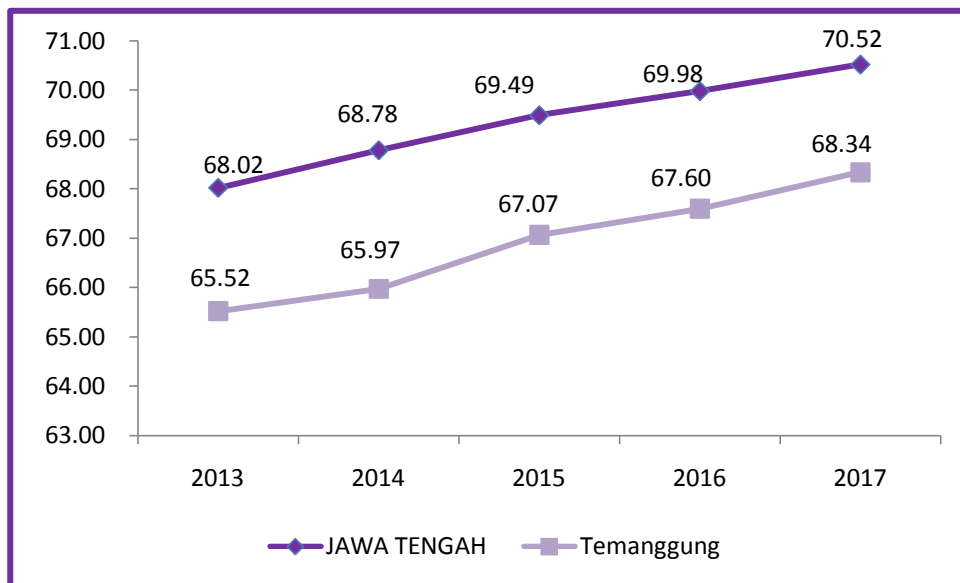
Oleh karena itu sudah seharusnya Kabupaten Temanggung menerapkan strategi pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat agar tercapai pemerataan hasil-hasil pembangunan secara lebih berkeadilan, sehingga tercipta sumber daya manusia yang tangguh dan kompetitif. Peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang handal menjadi solusi dan salah satu modal utama dalam proses pembangunan dewasa ini. Upaya peningkatan kualitas SDM dalam skala luas disebut sebagai pembangunan manusia.

Angka IPM mengindikasikan tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan. Indikasi peningkatan atau penurunan kinerja pembangunan manusia setiap tahunnya dapat diamati dari perkembangan angka IPM dari tahun ke tahun.

Keterbandingan angka IPM kabupaten dengan kabupaten/kota lain, angka IPM provinsi bahkan angka IPM nasional menentukan posisi relatif capaian IPM sekaligus mengukur relevansi pembangunan manusia di kabupaten itu dengan tingkat pemerintahan di atasnya.

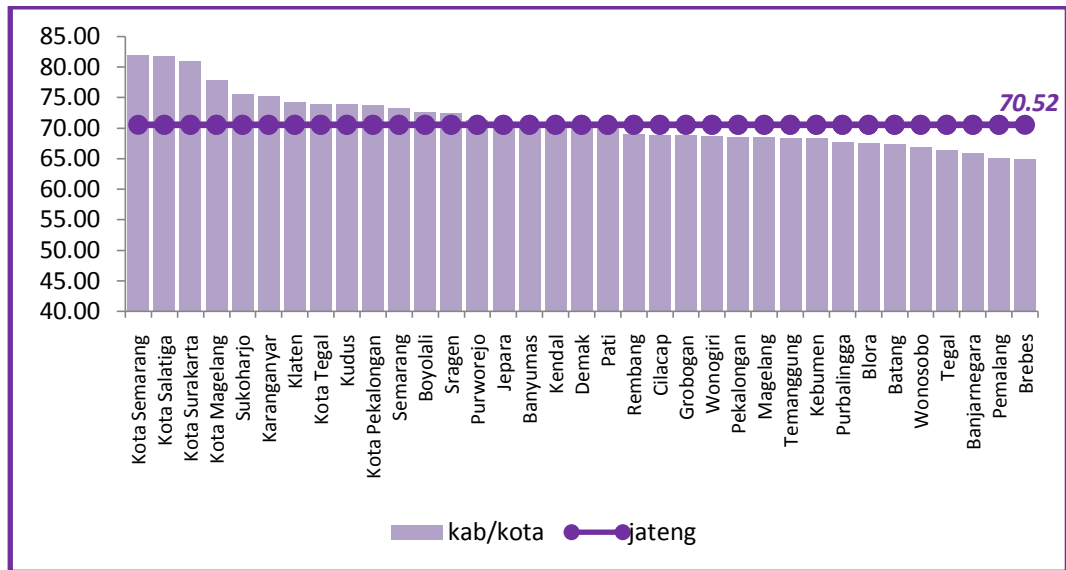
Sepanjang lima tahun terakhir, Kabupaten Temanggung mengalami kemajuan pembangunan sebagaimana terlihat dari nilai IPM yang semakin meningkat. Pada tahun 2013, IPM Kabupaten Temanggung adalah sebesar 65.52 kemudian terus mengalami peningkatan hingga mencapai 68.34 pada tahun 2017. Jika dibandingkan antar kabupaten/kota se Jawa Tengah, maka pada tahun 2017, IPM Kabupaten Temanggung masih tetap berada pada peringkat ke – 26 diantara 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 3.11. Perkembangan IPM Kabupaten Temanggung dan Provinsi Jawa Tengah, 2013– 2017



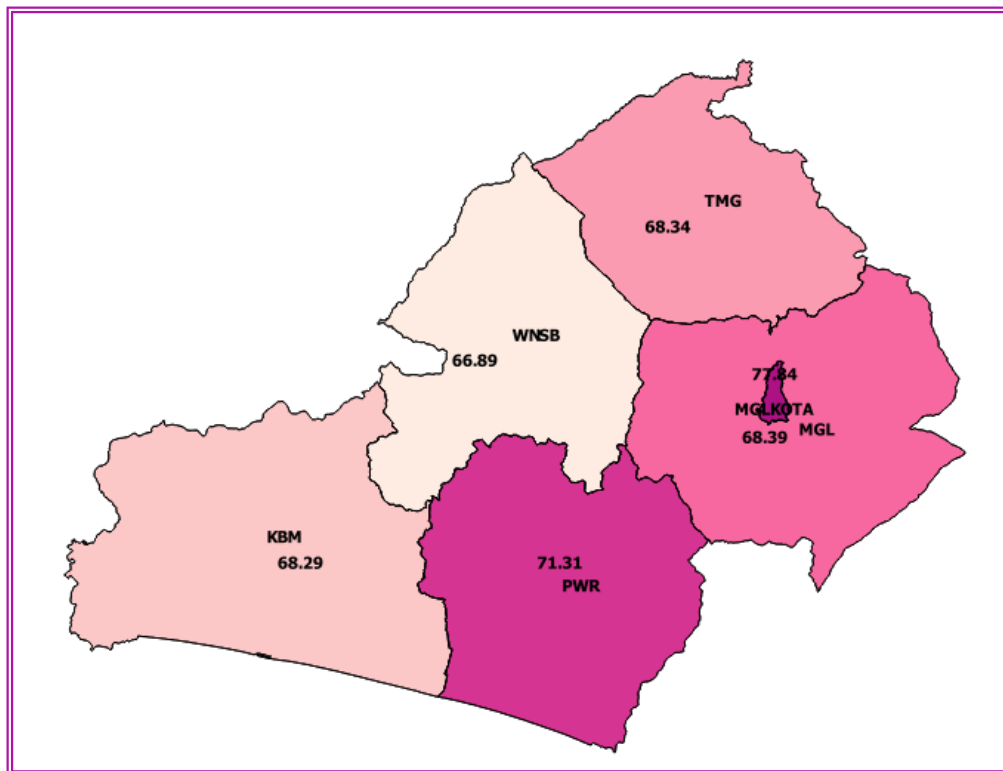
Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

Gambar 3.12. IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2017



Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

Gambar 3.13 IPM Menurut Kabupaten/Kota se Eks Karesidenan Kedu, 2017



Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

Sepanjang tahun 2013 – 2017, IPM Kabupaten Temanggung masih berada dibawah IPM Jawa Tengah dan berada pada peringkat ke 26 diantara 35 kabupaten/kota se Jawa Tengah. Ini menunjukkan bahwa pembangunan di Kabupaten Temanggung masih berada di bawah kemajuan pembangunan Jawa Tengah pada umumnya.

Jika dibandingkan dalam regional eks Karesidenan Kedu, IPM Kabupaten Temanggung juga terlihat cukup tertinggal, yaitu hanya pada peringkat 4 pada tahun 2017 dibawah Kota Magelang, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Magelang, lebih tinggi dibanding Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Wonosobo. Artinya dalam regional Karesidenan Kedu, pembangunan di Kabupaten Temanggung juga tertinggal dibanding dengan kabupaten/kota lain dalam regional tersebut.

3.2.1. Status Pembangunan Manusia dan Kecepatan IPM

Pengklasifikasian pembangunan manusia bertujuan untuk engorganisasikan wilayah - wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam dalam hal pembangunan manusia. Capaian IPM diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, yaitu:

- Sangat Tinggi : $IPM \geq 80$
- Tinggi : $70 \leq IPM < 80$
- Sedang : $60 \leq IPM < 70$
- Rendah : $IPM < 60$

Hanya ada 3 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang sudah mencapai status pembangunan tinggi yaitu Kota Surakarta, Kota Salatiga dan Kota Semarang. Sedangkan kabupaten/kota yang mencapai status pembangunan tinggi

Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan IPM per tahun. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan, semakin cepat IPM suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimalnya.

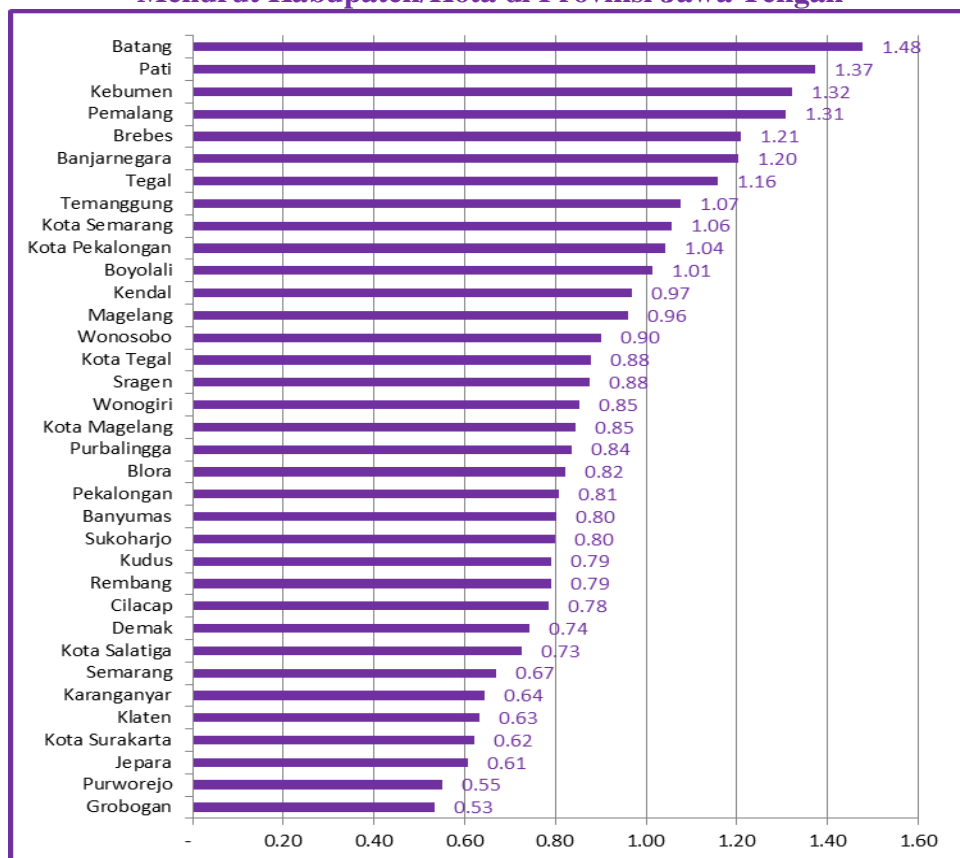
$$\text{Pertumbuhan IPM} = \frac{(IPM_t - IPM_{t-1})}{IPM_{t-1}} \times 100$$

Keterangan:

IPM_t : IPM suatu wilayah pada tahun t

IPM_{t-1} : IPM suatu wilayah pada tahun $(t-1)$

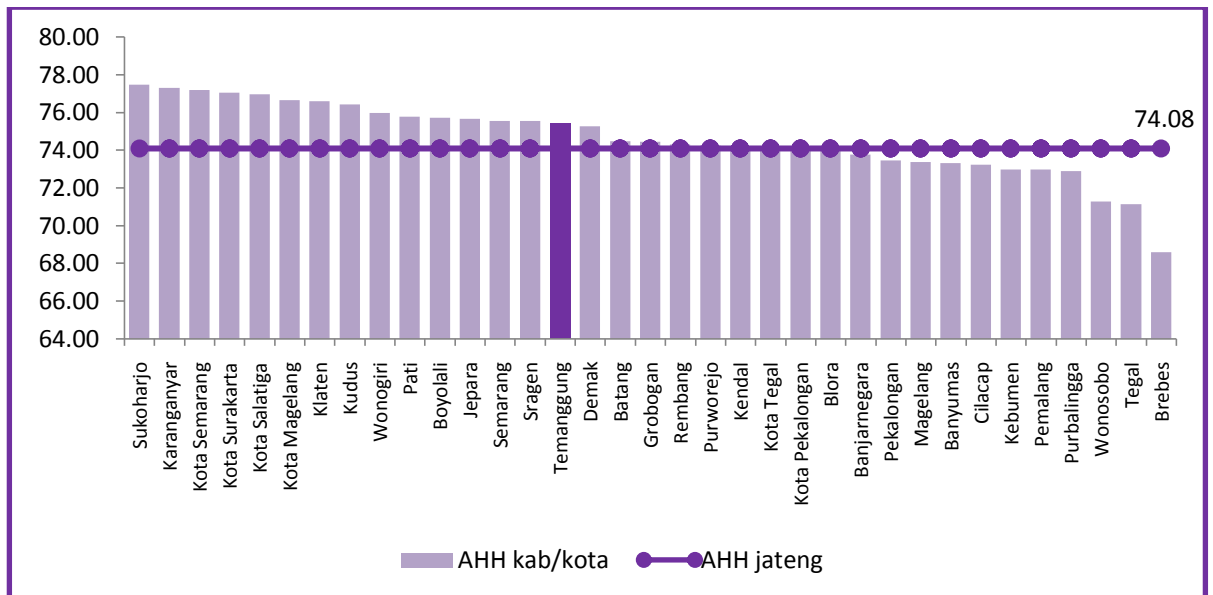
Gambar 3.15. Rata-Rata Pertumbuhan IPM per tahun (Tahun 2013 – 2017) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah



Kabupaten Temanggung pada tahun 2017 mencapai IPM 68,34 ,dengan kecepatan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 1,07 persen. Kecepatan pertumbuhan IPM Kabupaten Temanggung pada tahun 2017 tersebut menempati peringkat ke 7 se Provinsi Jawa Tengah. Jika kondisi ini dipertahankan dan selalu ditingkatkan maka pada tahun yang akan datang Temanggung akan mencapai IPM kategori Tinggi

3.2.2. Angka Harapan Hidup

Gambar 3.16. Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2017



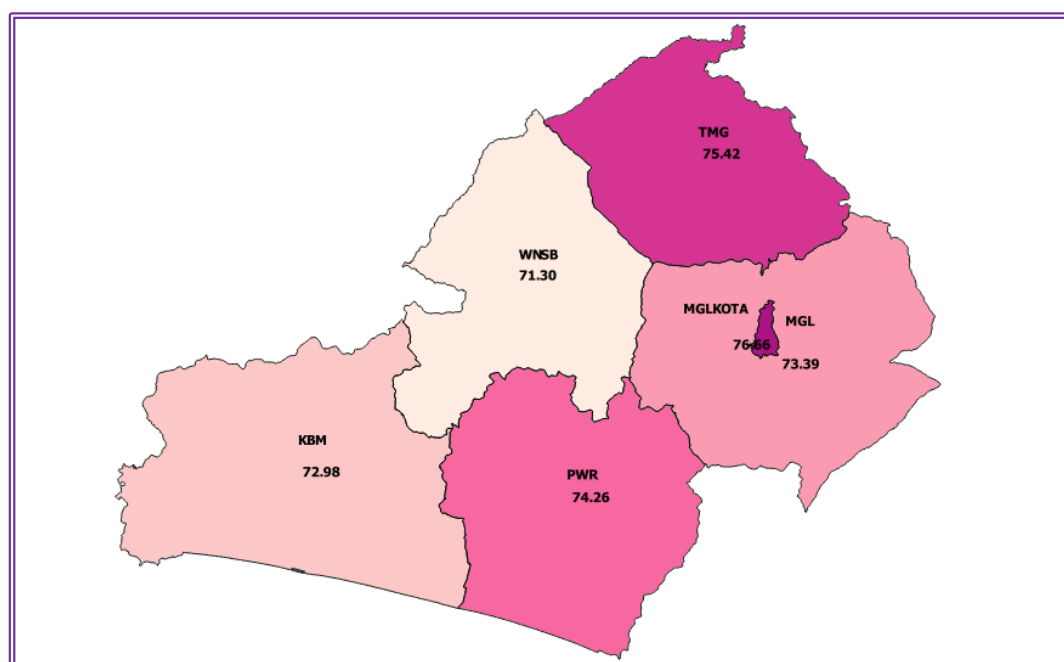
Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

Derajat kesehatan mempunyai hubungan timbal balik dengan pembangunan manusia. Angka harapan hidup yang tinggi setidaknya menunjukkan fenomena lebih terjaminnya aspek kesehatan, lingkungan yang sehat, sosial kemasyarakatan yang aman terjamin dan faktor-faktor pendukung alami lainnya. Selain itu angka harapan hidup yang tinggi juga dipengaruhi oleh

peran genetika, gizi, makanan, pola hidup, rendahnya paparan pencemaran serta kematangan psikologis sehingga seseorang secara alami menjadi lebih kuat/siap menghadapi tekanan hidup/stress.

Berdasarkan indikator angka harapan hidup, maka capaian pembangunan kesehatan di Kabupaten Temanggung berada pada peringkat ke 15 diantara 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Angka harapan hidup Kabupaten Temanggung pada tahun 2017 mencapai 75,42 tahun, lebih tinggi dibanding rata-rata angka harapan hidup Provinsi Jawa Tengah yang baru mencapai 74,08 tahun.

Gambar 3.17. Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Kabupaten/Kota se Eks Karesidenan Kedu, 2017



Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

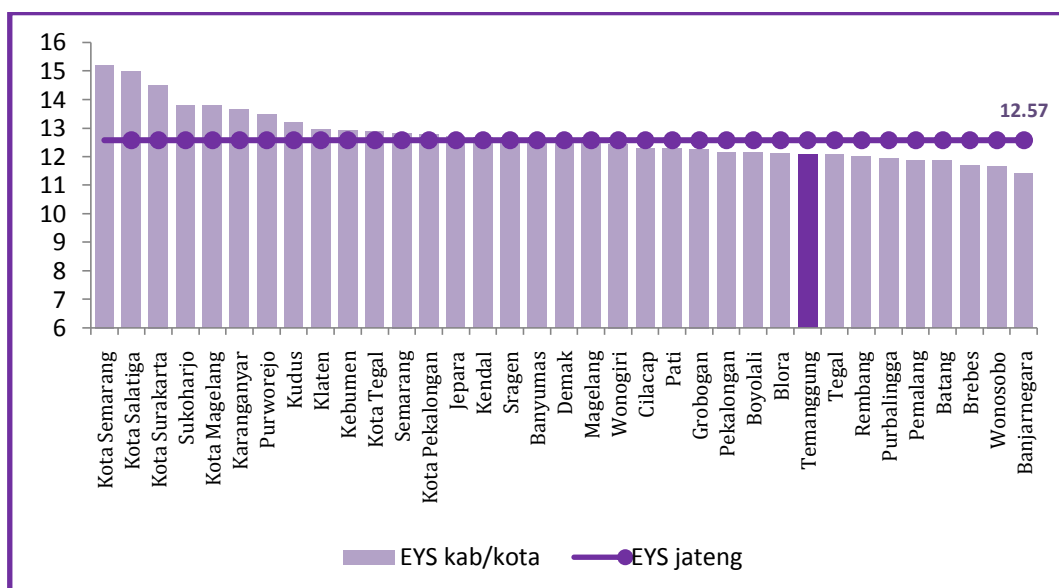
Angka Harapan Hidup Kabupaten Temanggung berada pada peringkat ke 2 diantara kabupaten/kota se eks Karesidenan Kedu, setelah angka harapan hidup Kota Magelang yang mencapai 76,66 tahun. Secara mikro, individu dengan harapan hidup yang tinggi secara ekonomis memiliki peluang untuk memperoleh

pendapatan yang tinggi. Keluarga dengan usia harapan hidup yang tinggi cenderung untuk menginvestasikan pendapatannya di bidang pendidikan dan menabung. Dengan demikian, tabungan nasional akan meningkat, investasi akan meningkat dan pada gilirannya akan meningkatkan pembangunan.

3.2.3. Harapan Lama Sekolah

Kebijakan Strategi Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 2005-2025 memiliki misi “*Knowledge Based Society*”. Pengertian “*Knowledge Based Society*” muncul karena adanya kesadaran tentang peran penting ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pertumbuhan ekonomi. *Knowledge* yang menyatu (*embodied*) dengan sumber daya manusia sebagai *human capital* dan teknologi menjadi pusat pembangunan ekonomi. Dalam pengertian tradisional tentang fungsi produksi maka terpusat pada buruh, modal, material dan energi. Sekarang pendekatan analisis ekonomi berkembang sehingga *knowledge* merupakan bagian langsung yang mempengaruhi faktor produksi.

Gambar 3.18. Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2017



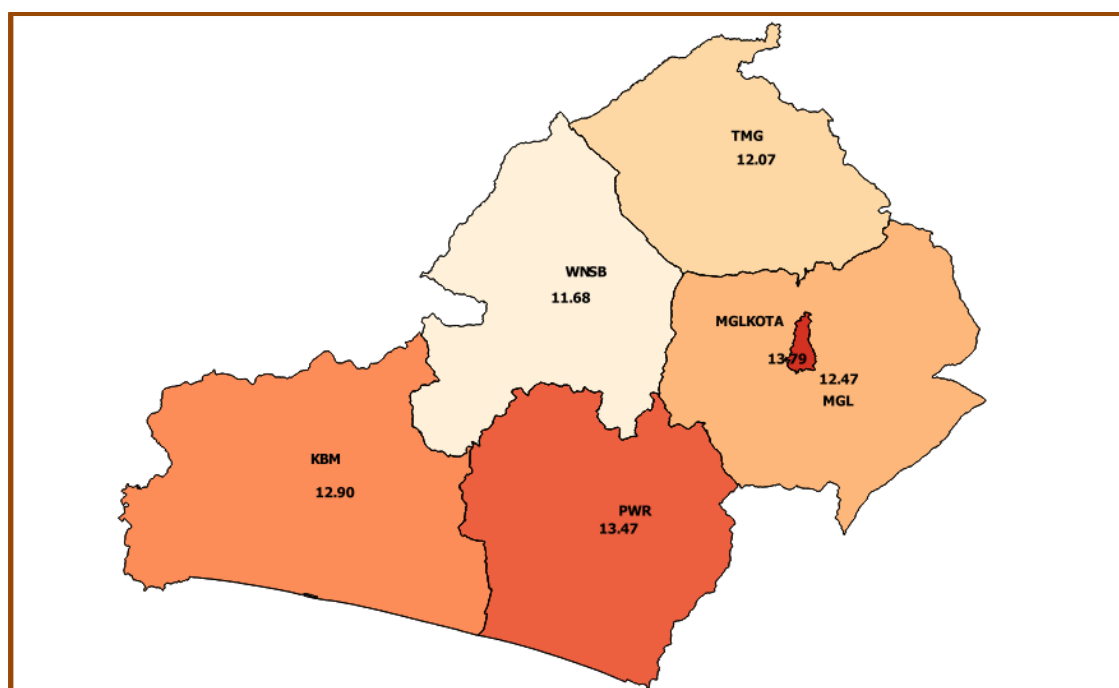
Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

Untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak digunakan indikator Harapan Lama Sekolah (*ExpectedYearsofSchooling-EYS*).

Angka harapan lama sekolah Kabupaten Temanggung pada Tahun 2016 berada pada peringkat ke 27diantara 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, yaitu sebesar 12,07 tahun dan dibawah harapan sekolah penduduk Provinsi Jawa Tengah pada umumnya yang mencapai 12,57 tahun.

Status pendidikan Kabupaten Temanggung berdasarkan indikator harapan lama sekolah masih sangat tertinggal dibandingkan kabupaten/kota lain di wilayah eks Karesidenan Kedu. Harapan lama sekolah Kabupaten Temanggung menempati peringkat ke 5, hanya sedikit lebih tinggi dibanding Kabupaten Wonosobo.

Gambar3.19. Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Kabupaten/Kota di Eks Karesidenan Kedu, 2017



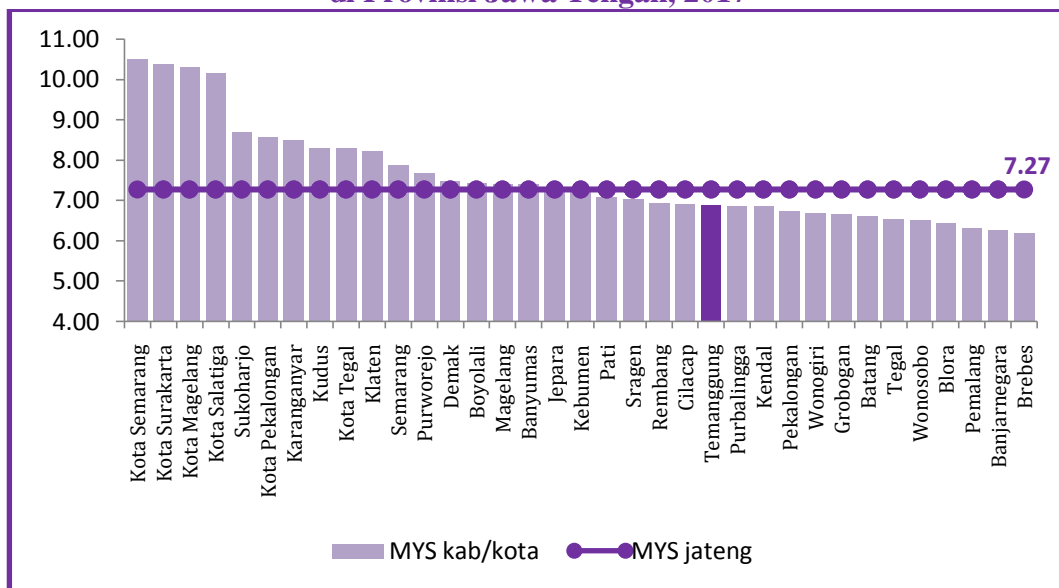
Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

3.2.4. Rata – Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Rata-rata lama sekolah merupakan indikator tingkat pendidikan di suatu daerah. Peningkatan pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi modal manusia yang seharusnya bisa meningkatkan produktifitas dan kemudian meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Secara prinadi, pendidikan yang lebih tinggi memungkinkan seseorang memperoleh akses ke pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik. Todaro (2000) mengatakan bahwa tingkat penghasilan sangat dipengaruhi oleh lamanya seseorang memperoleh pendidikan.

Gambar 3.20. Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2017

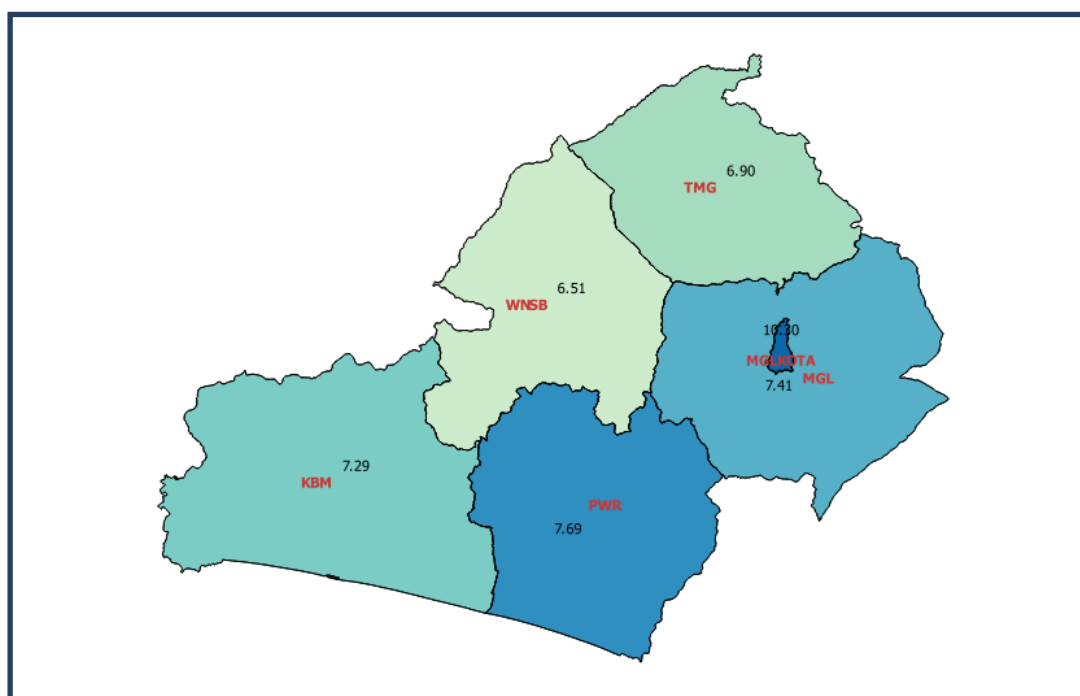


Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

Rata-rata lama sekolah Kabupaten Temanggung pada tahun 2017 baru mencapai 6,90 tahun, lebih rendah dibandingkan rata-rata lama sekolah penduduk Provinsi Jawa Tengah pada umumnya yang mencapai 7,27 tahun. Rata-rata lama

sekolah di Kabupaten Temanggung masih memprihatinkan jika dibandingkan dengan target nasional yang mewajibkan pendidikan dasar 9 tahun. Rata-rata penduduk Kabupaten Temanggung bersekolah kelas 1 atau kelas 2 SLTP. Rata-rata lama sekolah Kabupaten Temanggung berada pada peringkat ke 23 diantara 35 kabupaten/kota se Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 3.21. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota di Eks Karesidenan Kedu, 2017



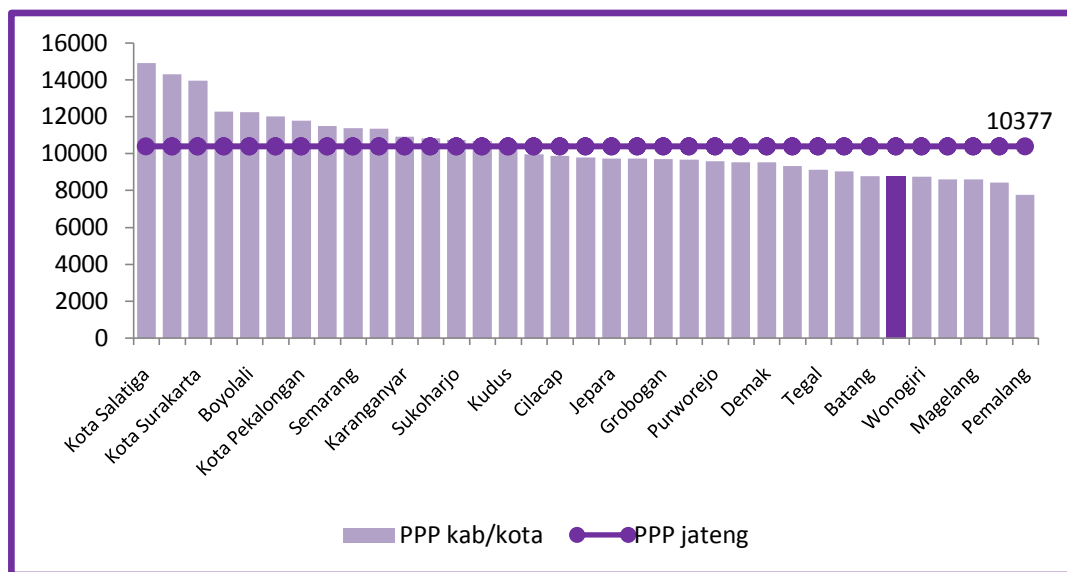
Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

Dengan menggunakan indikator ini, capaian pembangunan pendidikan di Kabupaten Temanggung masih sangat tertinggal di banding kabupaten/kota lain di wilayah eks Karesidenan Kedu. Rata-rata lama sekolah Kabupaten Temanggung menduduki peringkat ke 5, sedikit diatas Kabupaten Wonosobo. Jika penduduk Kabupaten Temanggung baru mencapai kelas 1 SLTP, rata-rata penduduk Kota Magelang sudah mencapai pendidikan hingga kelas 2 SLTA.

3.2.5 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan

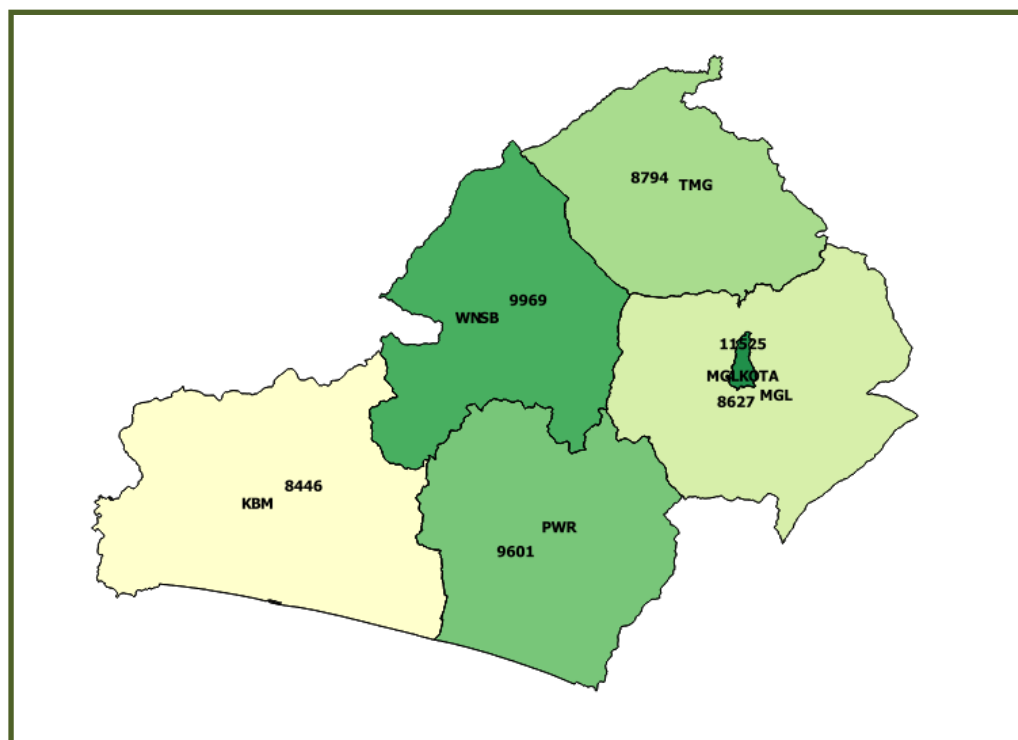
UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) riil per kapita yang disesuaikan untuk keperluan perbandingan antar negara. Sebagai catatan, setidaknya terdapat dua kelemahan penggunaan PDB riil perkapita sebagai ukuran standar hidup, yaitu bahwa PDB hanya merupakan nilai pasar atas barang dan jasa yang diproduksi, bukan ukuran kesejahteraan dan PDB per kapita menyamakan antara yang bekerja dan tidak bekerja serta distribusi pendapatan yang tidak merata. Untuk Indonesia, karena data PDB per kapita tidak tersedia pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, maka digunakan pengeluaran per kapita disesuaikan menggunakan data SUSENAS sebagai proksi pendapatan.

Gambar 3.22. Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2017 (000)



Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

Gambar 3.23. Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota se Eks Karesidenan Kedu, 2017



Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

Kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Temanggung ini masih sangat memprihatinkan jika dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah. Kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Temanggung hanya berada pada posisi ke 30 dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah, bahkan secara rata-rata cukup jauh dibanding kemampuan daya beli masyarakat Jawa Tengah pada umumnya. Pengeluaran per kapita per tahun penduduk Kabupaten Temanggung pada tahun 2017 adalah sebesar Rp 8.794.000, 00 sedangkan rata-rata pengeluaran per kapita per tahun penduduk Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp 10.377.000,00.

3.3. Tipologi Daerah Menurut IPM dan Pertumbuhan Ekonomi

UNDP

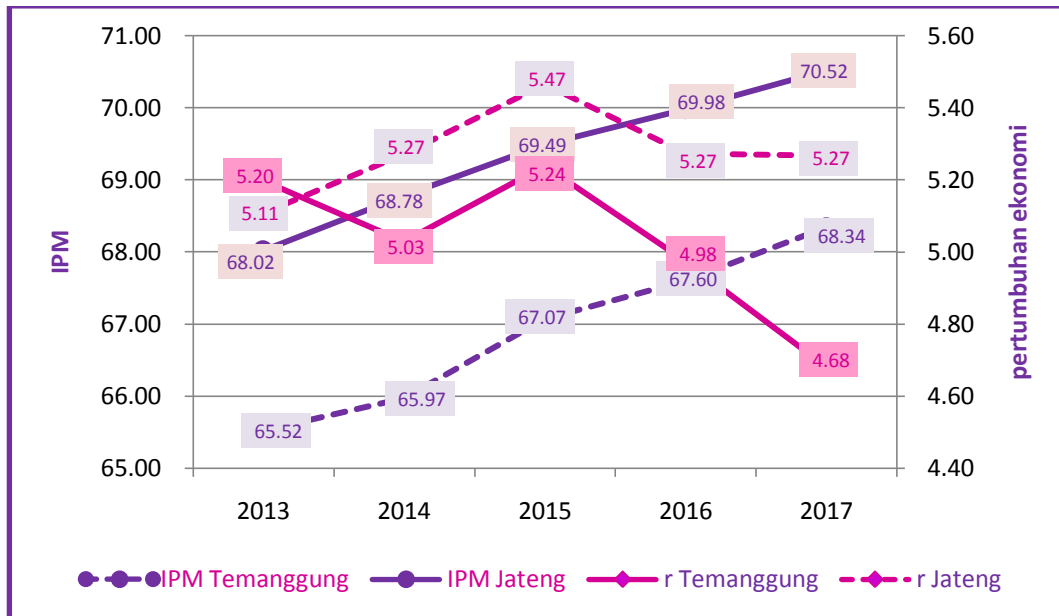
mengungkapkan bahwa pembangunan dapat berkesinambungan apabila didukung oleh pertumbuhan ekonomi. Walaupun keduanya tidak memiliki hubungan yang otomatis, namun apabila keduanya disatukan dalam kebijakan yang searah, akan tercipta kekuatan yang saling mendukung sehingga pertumbuhan ekonomi akan sangat efektif untuk memperbaiki pembangunan manusia.

Paradigma pembangunan konvensional menekankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebagai capaian dari pembangunan. Memang pertumbuhan ekonomi penting untuk mempertahankan kesejahteraan rakyat. Namun pertumbuhan ekonomi bukan merupakan akhir pembangunan manusia. Yang lebih penting adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi digunakan untuk memperbaiki kapabilitas manusianya dan pada gilirannya rakyat menggunakan kapabilitasnya (Kuncoro, 2013). Sebaliknya, paradigma pembangunan saat ini meletakkan manusia sebagai tujuan akhir pembangunan.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia selama periode 2013 - 2017 cenderung mengalami peningkatan, sementara pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi yang tajam. Sepanjang 5 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung konsisten tumbuh di atas 4 persen dengan pertumbuhan yang semakin cepat. Secara umum juga dapat dilihat bahwa sepanjang 2013 – 2017, IPM Kabupaten Temanggung selalu berada di bawah IPM Provinsi Jawa

Tengah, sebaliknya pada tahun 2013 mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 3.24. Perkembangan IPM dan Pertumbuhan Ekonomi (Tahun Dasar 2010) Kabupaten Temanggung dan Provinsi Jawa Tengah 2013 - 2017

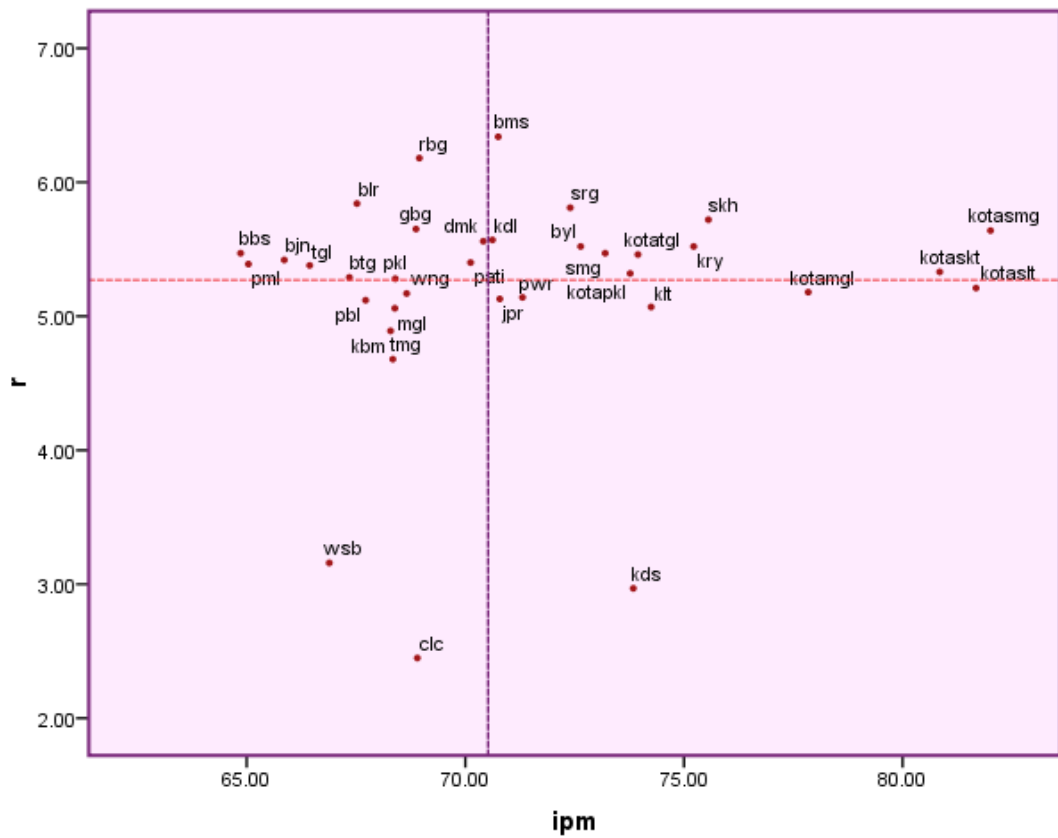


Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

Untuk melihat karakteristik IPM Kabupaten Temanggung khususnya dengan Provinsi Jawa Tengah pada umumnya, maka diperlukan analisis tipologi dengan mengadopsi klasifikasi *Klassen*, yaitu menggunakan indikator IPM dan pertumbuhan ekonomi. Melalui analisis ini karakteristik IPM kabupaten/kota dibandingkan dengan IPM Provinsi Jawa Tengah, sementara pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah. Disebut tinggi apabila indikator kabupaten/kota lebih tinggi dibanding indikator yang sama di Provinsi Jawa Tengah

dandigolongkanrendahapabilalebihrendahdibandingindikator yang sama di ProvinsiJawa Tengah

Gambar 3.25. Tipologi Daerah Menurut IPM dan Pertumbuhan Ekonomi (ADHK2010) di Provinsi Jawa Tengah, 2017



Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

Berdasarkan kuadran di atas, terlihat bahwa tipologi daerah menurut pertumbuhan ekonomi dan IPM adalah sebagai berikut :

- Daerah dengan pertumbuhan ekonomi dan IPM tinggi ada 11 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Pekalongan dan Kota Tegal
- Daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi dan IPM rendah ada 11 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Demak, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes.
- Daerah dengan pertumbuhan ekonomi dan IPM rendah adalah 7 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Temanggung.
- Daerah dengan pertumbuhan ekonomi rendah dan IPM tinggi ada 6 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Purworejo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kota Magelang dan Kota Salatiga.

Kabupaten Temanggung sendiri berada dalam kuadran III yaitu memiliki pertumbuhan ekonomi dan IPM yang rendah. Tentu bagi masyarakat Kabupaten Temanggung, terutama para stakeholder, posisi ini sangat mengkhawatirkan.

Tingkat pembangunan manusia yang relatif tinggi akan mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi melalui kapasitas penduduk dalam peningkatan produktivitas dan kreatifitas penduduk dalam menyerap dan

engelola sumberdaya alam (Brata, 2004). Sedangkan pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pembangunan manusia adalah melalui modal manusia terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Pendidikan mempengaruhi kualitas modal manusia baik secara mikro maupun makro. Pada level mikro, peningkatan pendidikan seseorang selaludikaitkandengan peningkatan pendapatan atau upah. Jika upah mencerminkan produktivitas, maka semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin tinggi produktivitasnya dan hasilnya ekonomi nasional akan tumbuh lebih tinggi.

Selanjutnya untuk mengetahui polahubungan antara pertumbuhan ekonomi dan IPM dapat dilakukan dengan korelasi *rank spearman*. Formula korelasi *rank spearman* adalah sebagai berikut:

$$r_s = 1 - \left(\frac{6 \sum D^2}{n(n^2 - 1)} \right)$$

Dimana :

r_s = koefisien korelasi *rank spearman*

D = perbedaan antar pasangan jenjang

N = jumlah sampel

Bila koefisien korelasi r_s bernilai nol, maka tidak ada korelasi dan bila r_s bernilai positif satu atau negatif satu, maka terdapat korelasi sempurna.

Tabel 3.7. Korelasi Rank Spearman IPM dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2017

Correlations		
	r	ipm

Spearman's rho	r	Correlation Coefficient	1.000	.145
		Sig. (2-tailed)	.	.406
		N	35	35
ipm		Correlation Coefficient	.145	1.000
		Sig. (2-tailed)	.406	.
		N	35	35

Berdasarkan perhitungan diatas diketahui bahwa nilai korelasi *rank spearman* antara IPM dan pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 0,406 dengan namun tidak signifikan. Secara statistik dapat dikatakan bahwa korelasi antara pertumbuhan ekonomi dengan IPM tidak cukup erat.

Masihrendahnyakontribusikualitaspembangunanmanusiaterhadapertumbuh anekonomimengindikasikanmasihrendahnyapehatianpemerintahdaerahterhadap e mbangunansumberdayamanusia.Intepretasi yang paling utamaadalahjikasuatudaerahinginmembangunperekonomian, makakualitassumberdayamanusiaharusdiperhatikan, demikianjugasebaliknyajikainginmengembangkansumberdayamanusia, makakerjaperekonomiantidak bisa diabaikan. Cara yang paling efektifuntukmencapaipembangunanmanusia yang berkelanjutanadalahdenganpencapaianpertumbuhanekonomi yang semakinmembaikdiikutipemerataanpendapatan (UNDP, 1999).

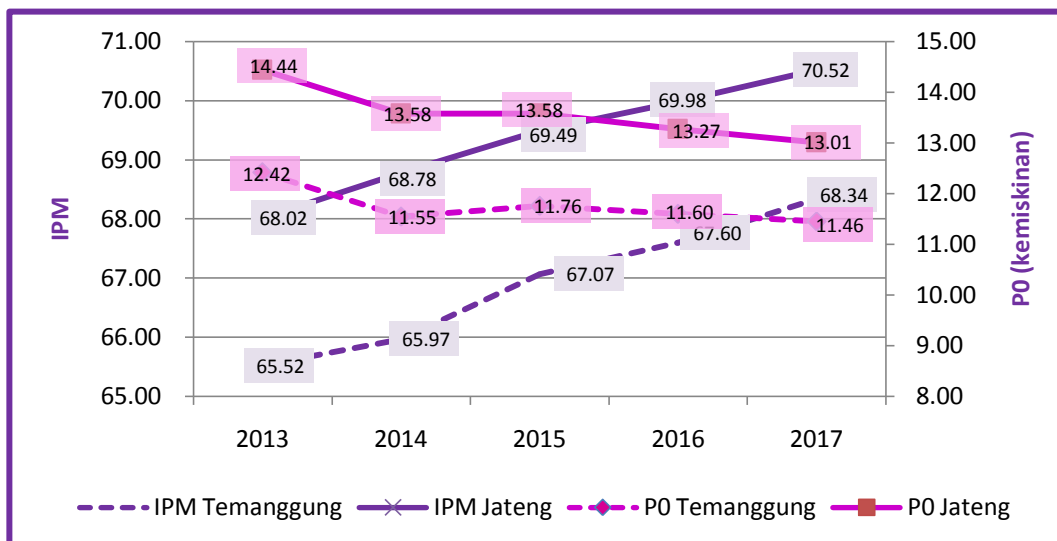
3.4. Tipologi Daerah Menurut IPM dan Kemiskinan

Bergesernya paradigma pembangunan yang hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) menjadi pertumbuhan melalui

pemerataan merupakan langkah bijak yang memihak kepada kepentingan masyarakat miskin dan lemah agar masyarakat miskin tersebut memiliki peluang untuk berusaha secara produktif dan pada gilirannya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi (Mubyarto, 2000).

Rumah tangga memegang peranan penting dalam pembangunan manusia, dimana pengeluaran rumah tangga memiliki kontribusi langsung terhadap pembangunan manusia seperti pengeluaran untuk makanan, pendidikan dan kesehatan. Pengeluaran rumah tangga itu sendiri ditentukan oleh pendapatan rumah tangga. Bagi penduduk miskin, sebagian besar bahkan seluruh pendapatannya digunakan untuk kebutuhan makan sehingga penduduk miskin tidak atau hanya sedikit memiliki kesempatan mendapat pendidikan dan kesehatan yang memadai. Hasil-hasil pembangunan seharusnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat baik masyarakat kaya, menengah maupun miskin. Oleh karenanya, keberhasilan pembangunan selain diindikasikan dengan peningkatan IPM, juga diindikasikan dengan menurunnya tingkat kemiskinan.

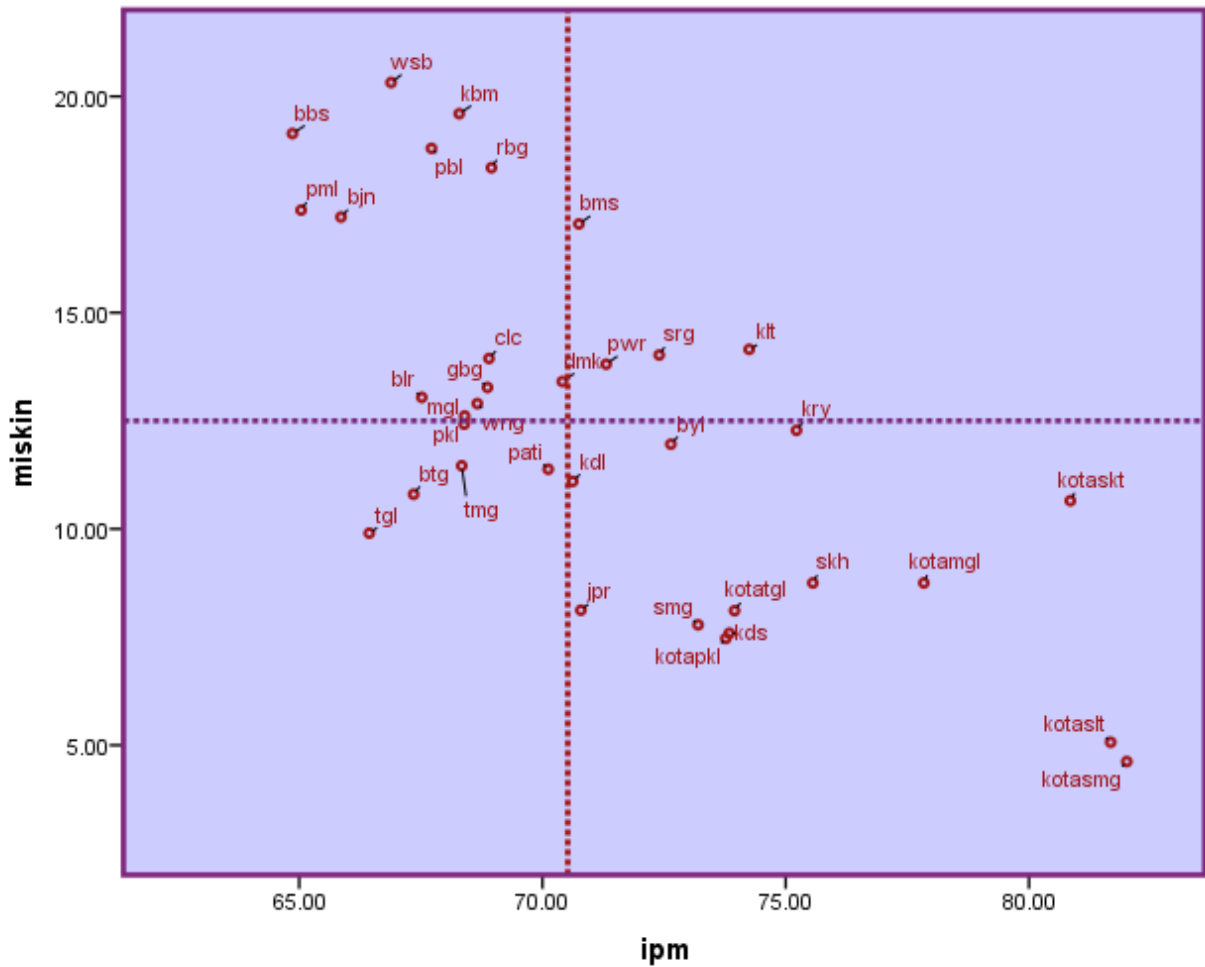
Gambar 3.27. Perkembangan IPM dan Kemiskinan Kabupaten Temanggung dan Provinsi Jawa Tengah, 2013 – 2017



Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa kemajuan pembangunan di Kabupaten Temanggung dapat dilihat dari meningkatnya IPM yang diiringi dengan menurunnya kemiskinan sepanjang tahun 2013 – 2017. Jika IPM Kabupaten Temanggung masih jauh dibawah IPM Provinsi Jawa Tengah, persentase penduduk miskin di Kabupaten Temanggung justru jauh lebih rendah dibandingkan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah pada umumnya.

Gambar 3.28. Tipologi Daerah Menurut IPM dan Persentase Penduduk Miskindi Provinsi Jawa Tengah, 2017



Sumber : BPS Kabupaten Temanggung

Meskipun tren pembangunan manusia selalu meningkat dan persentase penduduk miskin memiliki tren menurun, namun masih terdapat kesenjangan pembangunan manusia dan kemiskinan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Jika dilakukan analisis tipologi dengan mengadopsi tipologi klassen, maka dapat terlihat bagaimana pola kemiskinan dan IPM antara kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Terdapat 5 kabupaten/kota memiliki IPM tinggi namun kemiskinan tinggi juga, yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Demak. Kabupaten/kota ini berhasil

mencapai pembangunan manusia yang cukup baik namun pembangunan tersebut belum berhasil menurunkan kemiskinan di daerahnya. Salah satunya disebabkan karena kesenjangan pembangunan antar wilayah. Sebaliknya terdapat 13 kabupaten/kota yang berhasil mencapai pembangunan manusia tinggi sekaligus mampu mengurangi kemiskinan yaitu Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Pekalongan dan Kota Tegal. Kabupaten Temanggung termasuk dalam kuadran III yaitu daerah dengan kemiskinan yang rendah namun pembangunan manusia masih rendah, bersama dengan kabupaten Magelang, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Blora, Kabupaten Pati, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Tegal.

Pembangunan manusia, pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi merupakan satu paket prioritas pembangunan yang diharapkan akan bermuara pada kesejahteraan rakyat. Kebijakan pengentasan kemiskinan tentu akan meningkatkan kualitas manusia melalui peningkatan daya beli masyarakat, peningkatan derajat pendidikan maupun peningkatan akses ke pelayanan kesehatan dasar. Secara kuantitatif, erat tidaknya hubungan antara kemiskinan dengan IPM dapat diuji dengan statistik korelasi *rank spearman*.

Tabel 3.8. Korelasi Rank Spearman IPM dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2017

Correlations			ipm	miskin
Spearman's rho	ipm	Correlation Coefficient	1.000	-.633**
		Sig. (2-tailed)	.	.000
		N	35	35

miskin	Correlation Coefficient	-.633**	1.000
	Sig. (2-tailed)	.000	.
	N	35	35

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan perhitungan diatas diketahui bahwa nilai korelasi *rank spearman* antara IPM dan kemiskinan adalah sebesar -0,633 dengan tingkat signifikansi cukup tinggi. Secara statistik dapat dikatakan bahwa hubungan antara tingkat kemiskinan dan IPM berbeda arah dan cukup erat. Oleh karenanya kebijakan pembangunan yang paling efektif adalah kebijakan pembangunan manusia yang terintegrasi dengan pengurangan kemiskinan.

BAB IV

KESIMPULAN

Dari hasil analisis pada bab sebelumnya, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan yaitu :

1. IPM merupakan indikator untuk mengukur pelaksanaan pembangunan secara multidimensi. Karena IPM disusun berdasarkan konsep UN, maka IPM dapat diperbandingkan baik antar daerah maupun antar waktu. Pada tahun 2017, IPM Kabupaten Temanggung mencapai 68,34, meningkat dibanding tahun 2016 (67,60) dan tetap pada peringkat ke 26 diantara kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
2. IPM Kabupaten Temanggung didukung kuat oleh pembangunan dalam dimensi kesehatan di Kabupaten Temanggung. Pada tahun 2017, angka harapan hidup di Kabupaten Temanggung sudah cukup tinggi yaitu 75, 42 tahun dan berada pada peringkat ke 15 diantara kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah atau peringkat ke 2 diantara kabupaten/kota se eks Karesidenan Kedu.
3. Sebaliknya pembangunan dimensi pendidikan di Kabupaten Temanggung hingga tahun 2017 masih cukup tertinggal dibanding kabupaten/kota di Jawa Tengah. Hal ini dilihat dari Angka harapan Lama sekolah dan rata – rata lama sekolah yang masih jauh tertinggal yaitu masing masing sebesar 12,07 tahun (peringkat ke 27) dan 6,9 tahun (pada peringkat 23). Dapat dikatakan bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Temanggung bersekolah hanya sampai kelas 1 SLTP.

4. Pembangunan dimensi ekonomi yang ditunjukkan dengan indeks paritas daya beli juga masih rendah. Pada tahun 2017, indeks daya beli masyarakat Kabupaten Temanggung baru mencapai dibahanya sebesar RP 8.794.000 per kapita per tahun, jauh dibawah saya beli masyarakat Provinsi Jawa Tengah yang mencapai Rp 10.377.000,00 dan berada dalam peringkat ke 30.
5. Secara statistik dapat disimpulkan bahwa hubungan antara tingkat kemiskinan dan IPM berbeda arah dan cukup erat. Kemiskinan merupakan masalah utama dalam pembangunan. Angka kemiskinan Kabupaten Temanggung pada tahun 2017 menurun namun indeks keparahan kemiskinan dan indkes kedalaman kemiskinan justru meningkat. Pada kelompok masyarakat rentan miskin, kebijakan pengentasan kemiskinan diorientasikan untuk mwngurangi jumlah dan persentase penduduk miskin, sedangkan pada kelompok masyarakat sangat miskin diperlukan kebijakan yang berbeda agar insiden ketimpangan dan kedalaman kemiskinan dapat dikurangi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adioetomo, Sri Moertiningsih. 2005. *Bonus Demografi. Menjelaskan Hubungan Antara Pertumbuhan Penduduk Dengan Pertumbuhan Ekonomi*. Pidato Disampaikan pada Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ekonomi Kependudukan pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Brata, Aloysius Gunadi, 2004. *Analisis Hubungan Imbal Balik Antara Pembangunan Manusia dan Kinerja Ekonomi Daerah Tingkat II di Indonesia*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian – Universitas Atma Jaya.
- Hartono, Djoko.2008. *AKSES PENDIDIKAN DASAR: Kajian dari Segi Transisi SD ke SMP*. Jurnal Kependudukan Indonesia Vol. III, No.2, 2008
- Kuncoro, Mudrajad. 2014. *Mudah Memahami dan Menganalisis Indikator Ekonomi*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Mubyarto.2000. *Membangun Sistem Ekonomi*. Yogyakarta:BPFE
- Todaro dan Smith, 2000. *Pembangunan Ekonomi Jilid I* : Jakarta : Erlangga
- UNDP.1999. *Laporan Pembangunan Manusia*.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Metode Baru Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2013 – 2017

Kabupaten/Kota	IPM				
	2013	2014	2015	2016	2017
Cilacap	66,80	67,25	67,77	68.60	68.90
Banyumas	68,55	69,25	69,89	70.49	70.75
Purbalingga	65,53	66,23	67,03	67.48	67.72
Banjarnegara	62,84	63,15	64,73	65.52	65.86
Kebumen	64,86	65,67	66,87	67.41	68.29
Purworejo	69,77	70,12	70,37	70.66	71.31
Wonosobo	64,57	65,20	65,70	66.19	66.89
Magelang	65,86	66,35	67,13	67.85	68.39
Boyolali	69,81	70,34	71,74	72.18	72.64
Klaten	72,42	73,19	73,81	73.97	74.25
Sukoharjo	73,22	73,76	74,53	75.06	75.56
Wonogiri	66,40	66,77	67,76	68.23	68.66
Karanganyar	73,33	73,89	74,26	74.90	75.22
Sragen	69,95	70,52	71,10	71.43	72.40
Grobogan	67,43	67,77	68,05	68.52	68.87
Blora	65,37	65,84	66,22	66.61	67.52
Rembang	66,84	67,40	68,18	68.60	68.95
Pati	66,47	66,99	68,51	69.03	70.12
Kudus	71,58	72,00	72,72	72.94	73.84
Jepara	69,11	69,61	70,02	70.25	70.79
Demak	68,38	68,95	69,75	70.10	70.41
Semarang	71,29	71,65	71,89	72.40	73.20
Temanggung	65,52	65,97	67,07	67.60	68.34
Kendal	67,98	68,46	69,57	70.11	70.62
Batang	63,60	64,07	65,46	66.38	67.35
Pekalongan	66,26	66,98	67,40	67.71	68.40
Pemalang	61,81	62,35	63,70	64.17	65.04
Tegal	63,50	64,10	65,04	65.84	66.44
Brebes	61,87	62,55	63,18	63.98	64.86
Kota Magelang	75,29	75,79	76,39	77.16	77.84
Kota Surakarta	78,89	79,34	80,14	80.76	80.85
Kota Salatiga	79,37	79,98	80,96	81.14	81.68
Kota Semarang	78,68	79,24	80,23	81.19	82.01
Kota Pekalongan	70,82	71,53	72,69	73.32	73.77
Kota Tegal	71,44	72,20	72,96	73.55	73.95
JAWA TENGAH	68,02	68,78	69, 49	69.98	70.52

Lampiran 2. Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2013 – 2017

Kabupaten/Kota	IPM				
	2013	2014	2015	2016	2017
Cilacap	72,75	72,80	73,00	73.11	73.24
Banyumas	72,89	72,92	73,12	73.23	73.33
Purbalingga	72,76	72,80	72,81	72.86	72.91
Banjarnegara	73,34	73,39	73,59	73.69	73.79
Kebumen	72,61	72,67	72,77	72.87	72.98
Purworejo	73,77	73,83	74,03	74.14	74.26
Wonosobo	70,76	70,82	71,02	71.16	71.30
Magelang	73,21	73,25	73,27	73.33	73.39
Boyolali	75,58	75,61	75,63	75.67	75.72
Klaten	76,52	76,54	76,55	76.59	76.62
Sukoharjo	77,44	77,45	77,46	77.46	77.49
Wonogiri	75,80	75,84	75,86	75.88	76.00
Karanganyar	76,70	76,71	77,11	77.11	77.31
Sragen	75,27	75,31	75,41	75.43	75.55
Grobogan	74,03	74,07	74,27	74.37	74.46
Blora	73,79	73,84	73,85	73.88	73.99
Rembang	74,16	74,19	74,22	74.27	74.32
Pati	75,40	75,43	75,63	75.69	75.80
Kudus	76,39	76,40	76,41	76.43	76.44
Jepara	75,63	75,64	75,65	75.67	75.68
Demak	75,16	75,18	75,21	75.27	75.27
Semarang	75,48	75,50	75,52	75.54	75.57
Temanggung	75,31	75,34	75,35	75.39	75.42
Kendal	74,11	74,14	74,15	74.20	74.24
Batang	74,38	74,40	74,42	74.46	74.50
Pekalongan	73,30	73,33	73,35	73.41	73.46
Pemalang	72,59	72,64	72,77	72.87	72.98
Tegal	70,73	70,80	70,90	71.02	71.14
Brebes	67,81	67,90	68,20	68.41	68.61
Kota Magelang	76,54	76,57	76,58	76.62	76.66
Kota Surakarta	76,97	76,99	77,00	77.03	77.06
Kota Salatiga	76,53	76,53	76,83	76.87	76.98
Kota Semarang	77,18	77,18	77,20	77.21	77.21
Kota Pekalongan	74,06	74,09	74,11	74.15	74.19
Kota Tegal	74,06	74,10	74,12	74.18	74.23
JAWA TENGAH	73,28	72,73	73,96	74,02	74.08

Lampiran 3. Angka Harapan Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2013 – 2017

Kabupaten/Kota	IPM				
	2013	2014	2015	2016	2017
Cilacap	11,98	12,27	12,28	12,29	12,30
Banyumas	12,11	12,56	12,57	12,58	12,63
Purbalingga	11,10	11,51	11,78	11,93	11,94
Banjarnegara	10,53	10,70	11,39	11,40	11,41
Kebumen	11,83	12,07	12,49	12,61	12,90
Purworejo	12,83	13,03	13,04	13,05	13,47
Wonosobo	11,03	11,34	11,43	11,67	11,68
Magelang	11,76	12,00	12,14	12,15	12,47
Boyolali	11,33	11,65	12,13	12,14	12,15
Klaten	12,27	12,74	12,84	12,85	12,97
Sukoharjo	12,66	12,96	13,42	13,79	13,80
Wonogiri	11,77	11,94	12,42	12,43	12,44
Karanganyar	12,86	13,26	13,27	13,64	13,65
Sragen	11,92	12,19	12,21	12,30	12,64
Grobogan	12,06	12,24	12,25	12,26	12,27
Blora	11,53	11,75	11,91	11,92	12,13
Rembang	11,24	11,46	12,02	12,03	12,04
Pati	10,93	11,24	11,79	11,92	12,29
Kudus	12,34	12,58	13,14	13,19	13,20
Jepara	12,06	12,25	12,27	12,28	12,70
Demak	11,62	11,84	12,43	12,44	12,54
Semarang	12,55	12,81	12,82	12,83	12,84
Temanggung	11,39	11,69	11,89	12,06	12,07
Kendal	11,60	11,83	12,41	12,68	12,69
Batang	10,45	10,65	11,09	11,51	11,87
Pekalongan	11,55	11,93	12,00	12,15	12,16
Pemalang	11,05	11,26	11,86	11,87	11,88
Tegal	11,63	11,99	12,00	12,01	12,06
Brebes	10,75	11,03	11,34	11,37	11,69
Kota Magelang	12,65	12,98	13,10	13,55	13,79
Kota Surakarta	13,64	13,92	14,14	14,50	14,51
Kota Salatiga	14,61	14,95	14,97	14,98	14,99
Kota Semarang	13,66	13,97	14,33	14,70	15,20
Kota Pekalongan	11,56	11,93	12,59	12,77	12,78
Kota Tegal	11,61	11,96	12,46	12,88	12,89
JAWA TENGAH	11,89	12,17	12,38	12,29	12,57

**Lampiran 4. Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Tengah, 2013 – 2017**

Kabupaten/Kota	IPM				
	2013	2014	2015	2016	2017
Cilacap	6,43	6,48	6,58	6,90	6,91
Banyumas	7,18	7,31	7,31	7,39	7,40
Purbalingga	6,68	6,84	6,85	6,86	6,87
Banjarnegara	5,86	5,90	6,17	6,26	6,27
Kebumen	6,39	6,75	7,04	7,05	7,29
Purworejo	7,57	7,63	7,65	7,66	7,69
Wonosobo	5,92	6,07	6,11	6,12	6,51
Magelang	6,88	7,02	7,19	7,40	7,41
Boyolali	6,61	6,69	7,10	7,17	7,44
Klaten	7,74	7,92	8,16	8,22	8,23
Sukoharjo	8,25	8,41	8,50	8,58	8,71
Wonogiri	6,12	6,23	6,39	6,57	6,68
Karanganyar	8,38	8,47	8,48	8,49	8,50
Sragen	6,69	6,85	6,86	6,87	7,04
Grobogan	6,25	6,32	6,33	6,62	6,66
Blora	5,90	6,02	6,04	6,18	6,45
Rembang	6,70	6,90	6,92	6,93	6,94
Pati	6,27	6,35	6,71	6,83	7,08
Kudus	7,73	7,83	7,84	7,85	8,31
Jepara	7,09	7,29	7,31	7,32	7,33
Demak	7,22	7,44	7,45	7,46	7,47
Semarang	7,28	7,31	7,33	7,48	7,87
Temanggung	6,13	6,18	6,52	6,55	6,90
Kendal	6,42	6,53	6,64	6,65	6,85
Batang	5,88	6,00	6,41	6,42	6,61
Pekalongan	6,37	6,53	6,55	6,56	6,73
Pemalang	5,72	5,87	6,04	6,05	6,31
Tegal	5,85	5,93	6,30	6,54	6,55
Brebes	5,68	5,86	5,88	6,17	6,18
Kota Magelang	10,22	10,27	10,28	10,29	10,30
Kota Surakarta	10,25	10,33	10,36	10,37	10,38
Kota Salatiga	9,20	9,37	9,81	9,82	10,15
Kota Semarang	10,06	10,19	10,20	10,49	10,50
Kota Pekalongan	7,96	8,12	8,28	8,29	8,56
Kota Tegal	8,05	8,26	8,27	8,28	8,29
JAWA TENGAH	6,80	6,93	7,03	7,15	7,27

Lampiran 5. Pengeluaran Perkapita Per Bulan (000) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2013 – 2017

Kabupaten/Kota	IPM				
	2013	2014	2015	2016	2017
Cilacap	9.071	9.091	9.351	9,677	9,896
Banyumas	9.561	9.580	10.104	10,554	10,713
Purbalingga	8.535	8.539	8.938	9,159	9,340
Banjarnegara	7.654	7.684	7.930	8,400	8,630
Kebumen	7.730	7.755	8.008	8,276	8,446
Purworejo	9.155	9.189	9.305	9,497	9,601
Wonosobo	9.458	9.491	9.736	9,877	9,969
Magelang	7.856	7.877	8.182	8,501	8,627
Boyolali	11.490	11.504	11.806	12,192	12,262
Klaten	10.962	10.965	11.178	11,227	11,369
Sukoharjo	10.247	10.264	10.416	10,452	10,765
Wonogiri	8.235	8.249	8.417	8,589	8,765
Karanganyar	10.286	10.313	10.486	10,722	10,933
Sragen	10.857	10.876	11.434	11,688	12,041
Grobogan	9.284	9.303	9.457	9,487	9,716
Blora	8.540	8.568	8.699	8,846	9,065
Rembang	8.994	9.013	9.122	9,453	9,736
Pati	9.088	9.106	9.380	9,548	9,813
Kudus	10.082	10.102	10.203	10,348	10,639
Jepara	9.177	9.195	9.504	9,695	9,745
Demak	8.983	9.003	9.118	9,377	9,544
Semarang	10.562	10.586	10.778	11,102	11,389
Temanggung	8.042	8.062	8.369	8,593	8,794
Kendal	10.080	10.126	10.419	10,631	10,863
Batang	7.967	8.012	8.244	8,568	8,805
Pekalongan	8.884	8.938	9.208	9,300	9,702
Pemalang	6.863	6.911	7.177	7,447	7,785
Tegal	8.001	8.050	8.367	8,709	9,136
Brebes	8.731	8.784	8.898	9,148	9,554
Kota Magelang	10.258	10.344	10.793	11,090	11,525
Kota Surakarta	12.820	12.907	13.604	13,900	13,986
Kota Salatiga	14.125	14.205	14.600	14,811	14,921
Kota Semarang	12.714	12.802	13.589	13,909	14,334
Kota Pekalongan	10.922	11.006	11.253	11,721	11,800
Kota Tegal	11.416	11.519	11.748	11,849	12,283
JAWA TENGAH	9.618	9.640	9.930	10,153	10,377